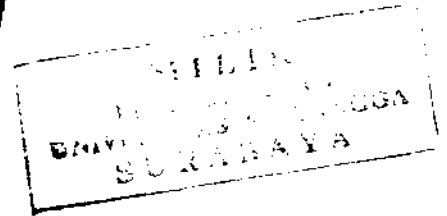


17
75 10/01
Su
k

TESIS

KOMUNITAS TRADISIONAL DI DAERAH TRANSMIGRASI

Suatu Studi Tentang Fungsi Banjar Adat Di Daerah Transmigrasi Desa Jati Bali
Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Kendari
Propinsi Sulawesi Tenggara



Oleh

I KETUT SUARDIKA

NIM: 0998 13219 - M

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

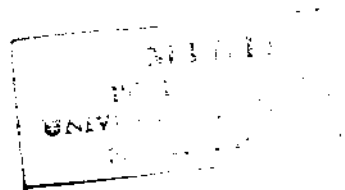
2000

KOMUNITAS TRADISIONAL DI DAERAH TRANSMIGRASI

**Suatu Studi Tentang Fungsi Banjar Adat Di Daerah Transmigrasi Desa Jati Bali
Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Kendari
Propinsi Sulawesi Tenggara**

TESIS

**Untuk memperoleh Gelar Magister
dalam Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial
pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga**



Oleh

I Ketut Suardika

NIM: 0998 13219 - M

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2000

LEMBAR PENGESAHAN

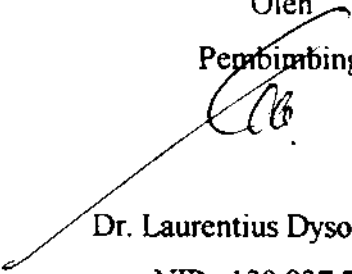
Tesis ini telah di uji dan dinyatakan Lulus
Tanggal, 22 Agustus 2000

TESIS

KOMUNITAS TRADISIONAL DI DAERAH TRANSMIGRASI

Suatu Studi Tentang Fungsi Banjar Adat Di Daerah Transmigrasi Desa Jati Bali
Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Kendari
Propinsi Sulawesi Tenggara

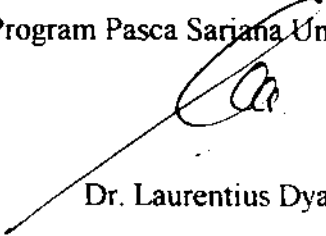
Oleh
Pembimbing



Dr. Laurentius Dyson P., MA
NIP. 130 937 724.-

Mengetahui

Ketua Prgram Studi Ilmu-Ilmu Sosial
Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga



Dr. Laurentius Dyason P., MA
NIP. 130 937 724.-

HALAMAN PENGUJI

Telah diuji pada

Tanggal, 22 Agustus 2000

Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Soetandiyo W., MPA.

- Anggota :
1. Dr. Laurentius Dyson P., MA.
 2. Dede Oetomo, Ph.D
 3. Drs. I Nyoman Naya Sujana, MA.
 4. Dra. Pinky Saptandari, MA.

UCAPAN TERIMA KASIH

Atas karunia Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis berjudul: "Komunitas Tradisional di Daerah Transmigrasi" (Suatu Studi tentang Fungsi Banjar Adat Bali di Daerah Transmigrasi Desa Jati Bali Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara) dapat diselesaikan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penulis menghaturkan puji syukur ke hadapan-Nya.

Tesis ini dapat diselesaikan juga berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis patut mengucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Dr. Laurentius Dyson P., MA. pembimbing ketua yang dengan penuh perhatian telah, memberikan dorongan, bimbingan dan saran sampai tesis ini terwujud.

Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pendidikan Nasional melalui Tim Managemen Program Doktor yang telah memberikan bantuan finansial, sehingga meringankan beban saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Dengan selesainya tesis ini, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Airlangga Dr. Laurentius Dyson P., MA., karena tanpa perkenan beliau penulis tidak akan pernah menjadi peserta program tersebut.

Rektor dan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Haluoleo Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara, yang memberi izin kepada penulis untuk mengikuti Program Pascasarjana (S2) di Universitas Airlangga Surabaya.

Rektor Universitas Airlangga Prof. H. Soedarto, dr, DTMH, Ph.D atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program magister.

Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga yang dijabat oleh Dr. Soedijono, dan atas kesempatan untuk menjadi mahasiswa program magister pada program pascasarjana Universitas Airlangga yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di daerah transmigrasi desa Jati Bali Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara.

Kadit Sospol Propinsi, Kadit Sospol Kabupaten dan camat Ranomeeto, Kabupaten Kendari Sulawesi Tenggara yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di wilayah pemerintahannya.

Seluruh staf pengajar Program Studi Ilmu-ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Airlangga yang telah banyak memberikan wawasan berpikir dalam perspektif ilmu sosial sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing.

Seluruh staf Tata Usaha Program Pascasarjana Universitas Airlangga yang memberi kemudahan-kemudahan kepada penulis.

Kepala Desa Jati Bali, Ketua Banjar Adat beserta staf dan seluruh informan tokoh-tokoh masyarakat atas kerja samanya dan kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada penulis.

Istriku tercinta, Ni Made Suartini, dan anak-anakku tersayang Putu Adi Sujana Putra, Kadek Ayu Meithasari, dan Komang Aldi Juliardika tanpa dorongan, pengertian dan kasihnya penulis mungkin tidak dapat menyelesaikan tesis ini.

Ibunda dan almarhum Ayahanda, atas doa-doanya yang tulus dan motivasinya sehingga tesis dapat diwujudkan.

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu namanya, yang secara langsung ataupun tidak langsung telah membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari tesis ini jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis terbuka untuk saran dari semua pihak demi penyempurnaan tesis ini. Namun demikian penulis masih berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan melalui banjar adat di daerah transmigrasi khususnya desa Jati Bali.

Penulis

I Ketut Suardika

ABSTRAK

Kata Kunci: Fungsi Banjar Adat di Daerah Transmigrasi Desa Jati Bali

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan tradisi banjar adat pada masyarakat di daerah transmigrasi di desa Jati Bali. Fokus kajiannya adalah tentang eksistensi dan perubahan fungsi tradisi banjar adat di daerah transmigrasi desa Jati Bali-dibandingkan dengan yang ada di Bali. Dan yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah eksistensi banjar adat di daerah transmigrasi desa Jati Bali?, dan (2) Perubahan apa saja yang terjadi dalam komunitas tradisional banjar adat pada masyarakat transmigrasi desa Jati Bali?.

Subyek penelitian (sampel penelitian) adalah individu (anggota banjar) dan pengurus banjar maupun stap desa dinas yang terdapat di Banjar adat, (banjar adat dusun satu, banjar adat dusun dua, dan banjar adat dusun tiga) desa Jati Bali Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara. Data dan informasi yang diperlukan berkenaan dengan studi tentang fungsi banjar adat di daerah transmigrasi desa Jati Bali telah diamati secara langsung pada subyek penelitian. Sehubungan dengan penelitian yang merupakan syarat utama, tetapi yang lebih penting adalah kualitas dari sumber data dan informasi yang dikumpulkan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data observasi dan wawancara. Hal ini sesuai dengan tradisi peneliti kualitatif yang lebih mementingkan kedua metoda pengumpulan data tersebut. Penekanan observasi ini ditujukan pada: lokasi/tempat suatu situasi sosial tertentu dan memainkan peran tertentu, dan kegiatan para krama banjar pada tempat berlangsung sesuatu situasi sosial. Sedangkan metode pengumpulan data wawancara di dasari oleh alasan: peneliti dapat menggali tidak saja apa yang yang diketahui dan dialami subyek penelitian, tetapi dapat juga jauh di dalam diri subyek penelitian, apa yang di tanyakan kepada subyek peneliti bisa ucapkan hal-hal lintas waktu yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang, dan juga

masa yang akan datang. Untuk melengkapi dan menggambarkan eksistensi banjar adat di desa Jati Bali, juga akan dibahas banjar adat yang ada di Bali dari berbagai literatur, dan hasil studi yang berguna sebagai pembandingan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa eksistensi banjar adat di daerah transmigrasi desa Jati Bali sangat dibutuhkan oleh krama banjar dalam mempertahankan nilai-nilai budaya yang telah ada, juga banjar sangat berfungsi dalam mensukseskan program pemerintah dalam berbagai sektor dan bagi krama banjar, fungsi banjar adat sangat bermanfaat dan dirasakan oleh anggotanya karena dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh krama banjarnya terutama di bidang upacara keagamaan dan kedukaan. (suka dan duka).

Bila dibandingkan dengan ada yang di Bali, banjar adat di daerah transmigrasi tidak berubah secara substansial, namun ada beberapa penyesuaian. Peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan, adat setempat, dan beragamnya masyarakat transmigrasi tidak memungkinkan adanya banjar adat seperti apa yang ada di Bali. Struktur yang ada disesuaikan pembagian wilayah yang berlaku, pelaksanaan awig-awig dikondisikan dengan keadaan, dan keberadaan Pura Kahyangan Tiga juga di sesuaikan dengan masyarakat Bali yang ada di desa Jati Bali.

Dengan hasil tersebut diharapkan keberadaan banjar adat desa Jati Bali sebagai salah satu bentuk kesatuan sosio-religius yang ada di Indonesia dapat dipertahankan dan difungsikan secara maksimal bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Atas karunia Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis berjudul: "Komunitas Tradisional di Daerah Transmigrasi" (Suatu Studi tentang Fungsi Banjar Adat Bali di Daerah Transmigrasi Desa Jati Bali Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara) dapat diselesaikan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penulis menghaturkan puji syukur ke hadapan-Nya.

Tesis ini dapat diselesaikan juga berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis patut mengucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Dr. Laurentius Dyson P., MA. pembimbing ketua yang dengan penuh perhatian telah, memberikan dorongan, bimbingan dan saran sampai tesis ini terwujud.

Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pendidikan Nasional melalui Tim Managemen Program Doktor yang telah memberikan bantuan finansial, sehingga meringankan beban saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Dengan selesainya tesis ini, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Airlangga Dr. Laurentius Dyson P., MA., karena tanpa perkenan beliau penulis tidak akan pernah menjadi peserta program tersebut.

Rektor dan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Haluoleo Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara, yang memberi izin kepada penulis untuk mengikuti Program Pascasarjana (S2) di Universitas Airlangga Surabaya.

Rektor Universitas Airlangga Prof. H. Soedarto, dr, DTMH, Ph.D atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program magister.

Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga yang dijabat oleh Dr. Soedijono, dan atas kesempatan untuk menjadi mahasiswa program magister pada program pascasarjana Universitas Airlangga yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di daerah transmigrasi desa Jati Bali Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara.

Kadit Sospol Propinsi, Kadit Sospol Kabupaten dan camat Ranomeeto, Kabupaten Kendari Sulawesi Tenggara yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di wilayah pemerintahannya.

Seluruh staf pengajar Program Studi Ilmu-ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Airlangga yang telah banyak memberikan wawasan berpikir dalam perspektif ilmu sosial sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing.

Seluruh staf Tata Usaha Program Pascasarjana Universitas Airlangga yang memberi kemudahan-kemudahan kepada penulis.

Kepala Desa Jati Bali, Ketua Banjar Adat beserta staf dan seluruh informan tokoh-tokoh masyarakat atas kerja samanya dan kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada penulis.

Istriku tercinta, Ni Made Suartini, dan anak-anakku tersayang Putu Adi Sujana Putra, Kadek Ayu Meithasari, dan Komang Aldi Juliardika tanpa dorongan, pengertian dan kasihnya penulis mungkin tidak dapat menyelesaikan tesis ini.

Ibunda dan almarhum Ayahanda, atas doa-doanya yang tulus dan motivasinya sehingga tesis dapat diwujudkan.

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu namanya, yang secara langsung ataupun tidak langsung telah membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari tesis ini jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis terbuka untuk saran dari semua pihak demi penyempurnaan tesis ini. Namun demikian penulis masih berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan melalui banjar adat di daerah transmigrasi khususnya desa Jati Bali.

Penulis

I Ketut Suardika

DAFTAR ISI

Halaman Judul	I
Lembar Pengesahan	ii
Halaman Tim Penguji	iii
Ucapan Terima Kasih	iv
Daftar Isi	vii
Abstrak	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Lokasi Penelitian.....	8
1.5.2 Subyek Penelitian.....	9
1.5.3 Tahap-Tahap Penelitian	10
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data	11
1.5.5 Teknik Pengolahan Dan Analisa Data	12
1.6 Kerangka Konseptual.....	13
1.6.1 Banjar Sebagai Komunitas Tradisional.....	13
1.6.2 Kebudayaan Bali	14

1.6.3	Sistem Sosial Masyarakat Bali	16
1.6.4	Teori Fungsional Dan Perubahan Sosial	18
BAB II	WILAYAH DAN DEMOGRAFI PENELITIAN.....	21
2.1	Wilayah Penelitian Dan Sejarahnya.....	21
2.2	Demografi Penduduk Desa Jati Bali.....	23
2.3	Alat Transfortasi Di Desa Jati Bali.....	25
2.4	Lahirnya Banjar Adat Di Desa Jati Bali.....	26
BAB III	KEBERADAAN BANJAR ADAT DI BALI.....	29
3.1	Pengertian Banjar.....	29
3.2	Struktur Organisasi Banjar Dinas.....	33
3.3	Struktur Organisasi Banjar Adat.....	35
3.4	Keanggotaan Krama Banjar.....	37
3.5	Aturan-Aturan (Awig-Awig) Dalam Banjar.....	40
3.6	Pandangan Hidup Dan Keyakinan Masyarakat Bali.....	43
BAB IV	FUNGSI DAN KEBERADAAN BANJAR ADAT DI DAERAH	
	TRANSMIGRASI.....	45
4.1	Fungsi Banjar Adat Di Desa Jati Bali.....	45
4.1.1	Fungsi Mengatur Krama Desa Dengan Khayangan.....	47
4.1.2	Fungsi Mengatur Pelaksanaan Panca Yadnya Agama Hindu	50
4.1.3	Mengatur Hubungan Antar Sesama Krama Banjar.....	53
4.1.4	Fungsi Menetapkan Sanksi-Sanksi Bagi Pelanggaran	
Terhadap Hukum Adat.....		58
4.1.5	Mengurus Barang-Barang Milik Desa Adat Atau Banjar	

Serta Tempat Suci Kahyangan Tiga.....	63
4.1.6 Perlindungan Hukum, Menjaga Ketertiban, Keamanan, Dan Kedamaian Dalam Masyarakat.....	64
4.1.7 Mensukseskan Program Pemerintah.....	66
4.1.8 Meningkatkan Persatuan Dan Kesatuan Antar Krama Banjar Melalui Kegiatan Sosial Ekonomi	71
4.2. Perubahan Struktur Banjar Adat Yang Ada Di Desa Jati Bali	72
4.3. Pelaksanaan Awig-Awig di Desa Jati Bali	77
BAB V PENUTUP	78
5.1 Kesimpulan.....	78
5.2 Implikasi Teoritis.....	81
5.3 Implikasi Praktis	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Daftar Informan	
2. Peta Sulawesi Tenggara	
3. peta Wilayah Kabupaten Dati II Kendari	
4. Peta Wilayah kecamatan Ranomeeto	
5. Gambar-gambar/ Foto	
6. Surat Izin Penelitian Kadit Sospol Tingkat I Jawa Timur No. 072/0249/303/2000	
7. Surat Izin Penelitian Kadit Sospol Tingkat I Sultra Kendari No. 070/602,Dsp	
8. Surat Izin Penelitian Kadit Sospol Tingkat II Kabupaten Kendari No. 070/489.Ksp.	
9. Surat Izin Penelitian Kecamatan Ranomeeto No. 070/89	
10. Surat Keterangan telah mengadakan penelitian No. 470/014/JB/VII/2000.	

ABSTRAK

Kata Kunci: Fungsi Banjar Adat di Daerah Transmigrasi Desa Jati Bali

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan tradisi banjar adat pada masyarakat di daerah transmigrasi di desa Jati Bali. Fokus kajiannya adalah tentang eksistensi dan perubahan fungsi tradisi banjar adat di daerah transmigrasi desa Jati Bali-dibandingkan dengan yang ada di Bali. Dan yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah eksistensi banjar adat di daerah transmigrasi desa Jati Bali?, dan (2) Perubahan apa saja yang terjadi dalam komunitas tradisional banjar adat pada masyarakat transmigrasi desa Jati Bali?.

Subyek penelitian (sampel penelitian) adalah individu (anggota banjar) dan pengurus banjar maupun stap desa dinas yang terdapat di Banjar adat, (banjar adat dusun satu, banjar adat dusun dua, dan banjar adat dusun tiga) desa Jati Bali Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara. Data dan informasi yang diperlukan berkenaan dengan studi tentang fungsi banjar adat di daerah transmigrasi desa Jati Bali telah diamati secara langsung pada subyek penelitian. Sehubungan dengan penelitian yang merupakan syarat utama, tetapi yang lebih penting adalah kualitas dari sumber data dan informasi yang dikumpulkan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data observasi dan wawancara. Hal ini sesuai dengan tradisi peneliti kualitatif yang lebih mementingkan kedua metoda pengumpulan data tersebut. Penekanan observasi ini ditujukan pada: lokasi/tempat suatu situasi sosial tertentu dan memainkan peran tertentu, dan kegiatan para krama banjar pada tempat berlangsung sesuatu situasi sosial. Sedangkan metode pengumpulan data wawancara di dasari oleh alasan: peneliti dapat menggali tidak saja apa yang yang diketahui dan dialami subyek penelitian, tetapi dapat juga jauh di dalam diri subyek penelitian, apa yang di tanyakan kepada subyek peneliti bisa ucapkan hal-hal lintas waktu yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang, dan juga

masa yang akan datang. Untuk melengkapi dan menggambarkan eksistensi banjar adat di desa Jati Bali, juga akan dibahas banjar adat yang ada di Bali dari berbagai literatur, dan hasil studi yang berguna sebagai pembanding.

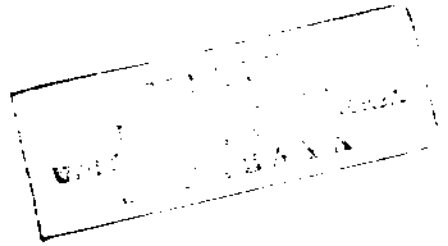
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa eksistensi banjar adat di daerah transmigrasi desa Jati Bali sangat dibutuhkan oleh krama banjar dalam mempertahankan nilai-nilai budaya yang telah ada, juga banjar sangat berfungsi dalam mensukseskan program pemerintah dalam berbagai sektor dan bagi krama banjar, fungsi banjar adat sangat bermanfaat dan dirasakan oleh anggotanya karena dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh krama banjarnya terutama di bidang upacara keagamaan dan kedukaan. (suka dan duka).

Bila dibandingkan dengan ada yang di Bali, banjar adat di daerah transmigrasi tidak berubah secara substansial, namun ada beberapa penyesuaian. Peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan, adat setempat, dan beragamnya masyarakat transmigrasi tidak memungkinkan adanya banjar adat seperti apa yang ada di Bali. Struktur yang ada disesuaikan pembagian wilayah yang berlaku, pelaksanaan awig-awig dikondisikan dengan keadaan, dan keberadaan Pura Kahyangan Tiga juga di sesuaikan dengan masyarakat Bali yang ada di desa Jati Bali.

Dengan hasil tersebut diharapkan keberadaan banjar adat desa Jati Bali sebagai salah satu bentuk kesatuan sosio-religius yang ada di Indonesia dapat dipertahankan dan difungsikan secara maksimal bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap masyarakat mempunyai sistem tersendiri dalam mengatur dan mengelola hubungan antar warganya. Sistem tersebut mengikat kuat setiap warga, sehingga keutuhan masyarakat akan tetap terjamin keberadaannya. Keterikatan mereka dapat berdasarkan nilai dan tradisi budaya masyarakat tersebut, rasa solidaritas budaya dan ikatan emosional antar penduduk yang demikian kuat.

Bangsa Indonesia terdiri dari banyak ragam suku bangsa dengan berbagai corak budaya dan sistem sosialnya. Struktur masyarakat Indonesia adalah mempunyai ciri khas yang menonjol yang terletak pada perbedaan nilai, pandangan, dan bentuk-bentuk sosialnya untuk menyesuaikan diri (Geertz, 1981:96). Dengan demikian perbedaan adalah hal yang lumrah terdapat dalam masyarakat Indonesia.

Pembangunan nasional yang sudah dilaksanakan bangsa Indonesia selama ini tidak merata serta telah merubah keunikan bangsa dan menyeragamkannya. Masih ada beberapa budaya dan sistem sosial yang dipertahankan oleh masyarakatnya, meskipun pembangunan telah membawa banyak perubahan. Salah satu etnik yang sudah dikenal oleh beberapa kalangan, baik manca negara maupun daerah-daerah di Indonesia lainnya adalah kebudayaan Bali. Masyarakat Bali mempunyai identitas sosial budaya yang khusus yang berbeda dari etnik-etnik lain di Indonesia.

Kebudayaan Bali sangat erat kaitannya dengan adat dan agama yang dianut oleh sebagian besar penduduknya, yaitu agama Hindu. Secara umum kebudayaan

Bali sejalan dengan perkembangan hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga hubungan inilah yang disebut *Tri Hita Karana* yang menjadi dasar untuk menciptakan kebahagiaan.

Kebudayaan dapat dibedakan ke dalam tiga wujud kebudayaan yakni:

(1) wujud kebudayaan sebagai komplek ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma, peraturan; (2) wujud kebudayaan sebagai komplek aktivitas tindakan berpola manusia dalam masyarakat; (3) wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Ketiga wujud kebudayaan tersebut dapat dirinci ke dalam tujuh unsur kebudayaan universal, yakni: (1) bahasa; (2) sistem pengetahuan; (3) organisasi sosial; (4) sistem peralatan hidup dan teknologi; (5) sistem mata pencaharian hidup; (6) sistem religi; dan (7) kesenian.

Manusia adalah makhluk sosial yang cenderung mengadakan hubungan dengan sesamanya yang akhirnya membentuk suatu masyarakat. Interaksi dan komunikasi antar anggota masyarakat bertujuan meneruskan tata nilai, gagasan dan keyakinan serta pengetahuan dan tradisi yang mereka miliki. Oleh karena itu, kelompok sosial yang terbentuk tersebut dapat mempunyai ciri khas sebagai bentuk kelompok sosial yang nyata. Demikian juga kelompok sosial tersebut memperlihatkan wujudnya sebagai bentuk tanggapan aktif manusia dalam merespon lingkungannya. Berbagai bentuk kelompok sosial dapat berupa komunitas, seperti komunitas petani, komunitas nelayan, dan sebagainya.

Sebagai suatu kesatuan sosial, warga komunitas biasanya mempunyai ikatan kesatuan yang demikian kuat sehingga menjadi sentimen perasaan akan sebagai satu komunitas. Hal itu dapat menimbulkan rasa kepribadian kelompok serta kebanggaan

dan cinta pada wilayah serta kelompok sosialnya. Dengan demikian rumusan komunitas itu mempunyai tiga ciri pokok yaitu; wilayah, kepribadian, dan kelompok (Astika, dkk, 1986:2).

Menurut F.A. Lietrinck (dalam Dharmayudha, 1995:74) Bali adalah "*Republik Desa*" (Village Republic), di mana desa merupakan wakil Bali dari dahulu kala dalam fungsinya sampai sekarang ini. Ia juga menambahkan bahwa komunitas tradisional seperti desa atau *banjar* dan *subak* adalah sebagai "*Bali sesungguhnya*" (*The Real Bali*). Mengacu pendapat tersebut, desa adat atau banjar merupakan salah satu ciri utama yang dapat membedakan, masyarakat Bali dengan masyarakat lainnya. Komunitas tradisional banjar tersebut tidak dapat hilang begitu saja dan digantikan dengan mudah dengan bentuk organisasi sosial yang baru.

Desa adat dan desa dinas masih dikenal dalam masyarakat Bali, hal itu merupakan bukti tidak bergesernya komunitas tradisional banjar Bali tersebut. Lietrinck menganggap bahwa di Bali terdapat desa yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai dinas. Di sisi lain, masyarakat Bali ternyata memegang tradisi untuk mengelompokkan dirinya dalam suatu komunitas dalam desa adat banjar selama diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, tidak sepenuhnya sebagian wilayah desa di Bali berdasarkan undang undang tersebut.

Dipertahankannya komunitas tradisional banjar Bali tersebut bukan tanpa alasan. Banjar ternyata mempunyai peranan penting sebagai lembaga adat dan sarana pembangunan nasional. Tradisi, nilai, dan kesenian akan sangat efektif diwariskan dan dikembangkan dalam banjar tersebut. Selain itu, melalui banjar program-program

pembangunan nasional akan mudah dilakukan dengan adanya wadah sosial yang sudah dikenal dan dipakai oleh masyarakat.

Perkembangan populasi penduduk Indonesia sangat memprihatinkan, karena jumlah yang demikian besar dan pemerataan penduduk antar pulau yang tidak proposional. Salah satu program pembangunan untuk mengatasi masalah kependudukan tersebut adalah transmigrasi. Transmigrasi di satu sisi diyakini mampu mengatasi problem kependudukan tersebut. Namun, di sisi lain, juga menimbulkan persoalan baru. Problema tersebut menyangkut dengan keberadaan komunitas tradisional yang tidak mungkin dengan mudah dipindah dan diseragamkan di wilayah transmigrasi.

Masyarakat Bali yang bertransmigrasi ke luar pulau Bali merupakan salah satu contoh yang baik mengenai problema di atas. Khusus menyangkut komunitas tradisional banjar Bali di daerah transmigrasi akan menghadapi berbagai problema. Jika banjar tersebut ada di Bali, maka sudah dapat dipahami dan dimaklumi, karena berada di tengah-tengah masyarakatnya sendiri. Di daerah transmigrasi, pembentukan wilayah tidak berdasarkan dan tidak dengan mudah mengakui komunitas tradisional, namun berpedoman pada undang-undang yang berlaku tentang pemerintahan daerah.

Wilayah di dasarkan sebagai kesatuan masyarakat hukum, sedangkan banjar dengan tegas berdasarkan tradisi. Sejalan dengan hal itu, penduduk yang ada dalam daerah transmigrasi juga beragam, tidak hanya dari Bali. Oleh karena itu, eksistensi banjar perlu dipersoalkan di tengah masyarakat yang beraneka ragam dan wilayah yang benar-benar baru. Kontak budaya dengan budaya lain, akan membawa dampak yang kadang menguntungkan, tetapi tidak jarang pula merugikan. Perubahan

kemungkinan terjadi, namun sesuai dengan keyakinan Lietrinck, masyarakat Bali yang sesungguhnya akan tetap mempertahankan banjar mereka sebagai "*The Real Bali*" di manapun mereka berada.

Beberapa studi tentang kehidupan etnik telah dilakukan oleh Fredrik Barth dan Karl G. Izikowitz (dalam Barth, 1983:143) terhadap etnik Patkhun (Pastlum, Patkhun, dan Afghan) yang hidup di Afganistan dan Pakistan. Studi tersebut menghasilkan suatu kesimpulan bahwa, masyarakat etnik yang hidup di luar daerah sendiri akan dengan mudah mempertahankan identitasnya hanya identitas tersebut jika mudah dilakukan dan tidak menimbulkan konflik. Selain itu juga mereka mempertahankan bila identitas tersebut mempunyai nilai guna bagi masyarakat di daerah perantauan. Dipaparkan lebih lanjut, melalui studinya terhadap suku Thai yang hidup di Thailand, dan Tonkin. Kedua tempat tersebut ternyata telah merubah suku Thai. Masyarakat Thai yang ada di Thailand dan Laos masih tetap mempertahankan agama Budha sedangkan masyarakat suku Thai yang di Tonkin telah terpengaruh budaya China (konfusius). Izikowitz juga mencatat dari studi tersebut, bahwa ada bagian budaya suku Thai yang masih tetap bertahan, yaitu tradisi mencari nafkah (mata pencharian) yang tetap mempertahankan berdagang, sementara masyarakat di Tonkin bertani. Mereka tidak terpengaruh dengan mata pencaharian penduduk setempat.

Beberapa hasil studi tersebut dapat dijadikan dasar kajian terhadap masyarakat Bali yang hidup di daerah transmigrasi, di luar pulau Bali. Merujuk pada hasil studinya Barth dan Izikowitz, masyarakat Bali akan mempertahankan identitasnya bila mudah dilakukan dan mempunyai nilai guna. Perubahan dapat saja terjadi pada

komunitas tradisional banjar di daerah transmigrasi, seperti pada kasus suku Thai di Tonkin. Namun, demikian ada sebagian tradisi yang ditinggal dan sebagian lainnya dipertahankan.

1.2. Rumusan Masalah

Setiap penelitian ilmiah memerlukan rumusan masalah penelitian yang selanjutnya dijadikan dasar agar penelitian yang dilakukan terarah dan terfokus pada masalah yang sudah dirumuskan sebelumnya. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah eksistensi komunitas tradisional banjar adat dalam masyarakat Bali di daerah transmigrasi, khususnya desa Jati Bali Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Kendari?
2. Perubahan apa saja yang terjadi dalam komunitas tradisional banjar adat masyarakat Bali di daerah Transmigrasi desa Jati Bali Kecamatan Ranomeeto kabupaten Kendari?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi komunitas tradisional banjar adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Bali yang mempunyai nilai sebagai pedoman dalam mencapai kehidupan yang dicita-citakan. Banjar sebagai suatu lembaga adat yang ada sejak dulu mempunyai peranan yang kompleks sekali, terutama dalam menata masyarakatnya, di samping sebagai

dinamisator dalam hal pelestarian budaya dan adat istiadat Bali. Selain itu banjar juga berperan dalam mensukseskan program-program pemerintah sesuai dengan kemajuan jaman.

1.3.2. Tujuan Khusus

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai secara khusus adalah:

1. Untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana eksistensi komunitas tradisional banjar adat masyarakat Bali di daerah transmigrasi, khususnya desa Jati Bali Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Kendari. Hal tersebut didasari adanya keragaman penduduk yang menempati desa Jati Bali yaitu mulai tahun 1968 sampai sekarang, di mana tidak hanya masyarakat Bali saja yang berada di desa tersebut, misalnya etnik pendatang dari selatan (etnik bugis).
2. Untuk mengetahui perubahan apa saja yang terjadi dalam komunitas tradisional banjar di daerah transmigrasi, khususnya desa Jati Bali Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Kendari, bila dilihat dari bentuk banjar yang ada di Bali pada umumnya. Hal tersebut didasarkan adanya perbedaan masyarakat yang ada dan lingkungan yang mengitarinya.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Memberi kontribusi ilmiah, yaitu sumbangan teoritis berupa tambahan khasanah keilmuan dalam bidang studi ilmu-ilmu sosial, khususnya dalam bidang kajian komunitas tradisional.
2. Memberi kontribusi bagi kebijakan pemerintah, di mana eksistensi banjar adat sebagai komunitas tradisional perlu diakui dan diperkenalkan secara maksimal demi suksesnya pembangunan nasional.
3. Dapat dijadikan dasar bagi penelitian yang lain, yang akan mengkaji masalah yang sama; yaitu tentang banjar adat Bali atau komunitas tradisional pada umumnya.

1.5. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini akan digambarkan tentang rancangan metode penelitian kualitatif. Menurut Guba dan Lincoln, penelitian kualitatif tersebut disebut *Naturalistic Inquiry* atau *Inquiry Ilmiah*. Sedangkan menurut D. William yang dikutip oleh Sanapiah Faisal, penelitian kualitatif sifatnya Naturalistik. Dalam hal ini peneliti akan menguraikannya dalam sub-sub: lokasi penelitian, subyek penelitian, tahap-tahap penelitian teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisa data.

1.5.1. Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di desa Jati Bali Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara, dengan pertimbangan bahwa desa

tersebut merupakan wilayah transmigrasi yang pertama atau transmigrasi perintis di daerah propinsi Sulawesi Tenggara, yakni pada tanggal 29 November 1969.

Ditetapkannya lokasi penelitian tersebut didasarkan pada bahwa desa Jati Bali dihuni oleh masyarakat Bali, dan suku-suku lain seperti, dari Bugis (Sulawesi Selatan), transmigrasi dari Jawa Barat (Sunda), dan penduduk asli (*tolaki*). Selain itu peneliti berasal dari daerah tersebut, sehingga masalah komunikasi tidak menjadi hambatan, dan desa Jati Bali merupakan daerah yang mudah dijangkau kendaraan umum yang letaknya kurang lebih 8 km dari ibu kota kecamatan, 80 km dari ibu kota kabupaten, dan 30 km dari ibu kota propinsi.

1.5.2. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah individu, yang cara memilihnya digunakan dengan teknik *purposive*, dengan pertimbangan bahwa desa Jati Bali ini adalah bentangan wilayah yang memiliki banjar adat, juga kecamatan (Ranomeeto) yang satu-satunya terletak setrategis dan memiliki desa yang dihuni oleh transmigran dari Bali. Subyek tersebut adalah anggota biasa banjar (*Krama Banjar*), orang-orang yang berstatus mewakili banjar seperti *Kelihang Banjar* atau Ketua Adat, Ketua Parisada tingkat desa dan pengurus lainnya.

Banjar yang dipilih dalam penelitian ini adalah: (1) banjar yang dikelilingi oleh beberapa etnik, yaitu Tolaki, etnik Sunda, dan Etnik Bugis; (2) keberadaan banjar tersebut masih tetap mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya; (3) dominasi banjar terhadap warga/krama masih besar, terutama banjar adatnya.

Menurut Spradley, untuk menentukan subyek penelitian melalui langkah-langkah: (1) subyek penelitian menguasai atau memahami masalah melalui proses akulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayati; (2) subyek penelitian yang masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti; (3) subyek penelitian yang mempunyai kesempatan yang memadai untuk dimintai informasi; (4) subyek penelitian yang tidak cenderung menyampaikn informasi hasil "kemasannya" sendiri; (5) subyek penelitian yang cukup asing akan peneliti, sehingga akan lebih menggairahkan dijadikan sebagai "guru" (nara sumber) (Faisal, 1990:11-15).

1.5.3. Tahap-Tahap Penelitian

Adapun tahap-tahap penelitian yang ditawarkan oleh Sanafiah Faisal (1990:45) dalam penelitian kualitatif adalah; (1) tahap eksplorasi yang meluas atau menyeluruh biasanya masih bergerak di tingkat permukaan, (2) tahap eksplorasi secara terfokus atau terseleksi guna mencapai tingkat kedalaman dan kerincian tertentu, (3) tahap mengecek dan mengkonfirmasi hasil temuan penelitian.

Sedangkan tahapan penelitian yang diajukan oleh Sanafiah Faisal tersebut sejalan dengan Moleong (1999) dalam bukunya Penelitian Kualitatif, di mana tahapan tersebut masih merupakan garis besarnya saja, tahapan yang lebih rinci disesuaikan dengan satuan masalah yang dibahas.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, pertama dilakukan observasi yang bersifat umum tentang lokasi penelitian. Hasil observasi tersebut dilakukan pemilihan pokok permasalahan yang menyangkut kepentingan penelitian. Kemudian ditentukan pemilihan subyek penelitian yang diperkirakan menguasai permasalahan yang diajukan peneliti. Pendekatan yang digunakan lebih menekankan pada pendekatan individu. Pendekatan ini memerlukan kreatifitas peneliti untuk bertanya dan melakukan observasi lapangan. Di dalam melakukan wawancara, peneliti mendekati subyek sebagai "nara sumber".

Untuk mengaktifkan semua itu peneliti menggunakan pendekatan "*human approach*" yang menjadikan individu sebagai "guru" dan sejawat peneliti. Dalam proses penelitian itu sendiri, berlangsung dengan memephatikan masalah yang berkembang di lapangan, sehingga peneliti akan berjalan sesuai dengan tuntutan penelitian. Data diharapkan diperoleh sesuai dengan urutan penelitian kualitatif yang dimulai dengan membahas permasalahan secara umum dan kemudian ke yang khusus.

Secara ringkas teknik yang digunakan adalah observasi dan wawancara. hal ini sesuai dengan tradisi penelitian kualitatif yang lebih mementingkan proses. Penekanan observasi pada; (1) lokasi situasi sosial itu berlangsung; (2) manusia pelaku atau aktor yang menduduki status sosial tertentu dan memainkan peran penting; (3) kegiatan para aktor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung (Faisal, 1990:77). Tujuan observasi ini adalah untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai komunitas banjar adat yang ada dalam masyarakat di desa Jati Bali yang

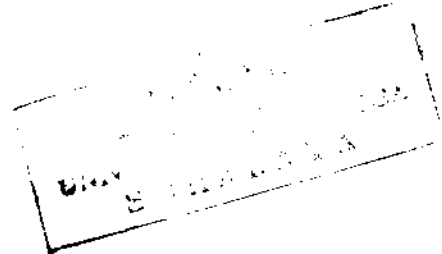
tidak terekam dalam wawancara. Melalui observasi masyarakat dapat dilihat secara konkrit oleh peneliti.

Teknik wawancara didasarkan alasan; (1) peneliti dapat menggali tidak hanya apa saja yang dilihat dan dialami subyek penelitian, tetapi dapat juga lebih jauh tentang diri subyek penelitian; (2) apa yang ditanyakan kepada subyek penelitian bisa mencakup hal-hal lintas waktu yang berkaitan dengan masa lalu, masa sekarang dan masa mendatang.

Fokus wawancara ditujukan kepada warga masyarakat yang dipilih sebagai subyek penelitian yang mengerti tentang banjar adat yang berada di desa jati Bali. Waktu wawancara tidak terikat, sepanjang peneliti masih mendapat "varian baru" wawancara terus dilakukan.

1.5.5. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Agar memperoleh hasil penelitian yang dapat menjelaskan permasalahan yang memadai, perlu dilakukan analisa terhadap data yang sudah terkumpul. Adapun cara menganalisa data tersebut dibagi menjadi empat cara, yaitu; (1) analisa domain, ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang sifatnya umum dan menyeluruh terhadap pokok-pokok masalah penelitian. Domain tersebut dikategorikan menurut hubungan sematis yang menyangkut tema penelitian; (2) analisa taksonomis, yang lebih merinci domain-domain yang menjadi bahasan penelitian. Perincian tersebut menurut kategorinya masing-masing pokok bahasan yang kegunaannya untuk memperdalam pembahasan masalah penelitian; (3) pembahasan menitikberatkan pada rincian ke dalam informasi yang perlu diperluas dengan komponensial. Dalam analisa



ini dikontraskan antar elemen dalam domain untuk mendapat pembahasan yang mempunyai rentangan yang lebih luas. Analisa ini dapat dilakukan dengan mengadakan wawancara terseleksi terhadap subyek penelitian yang terpilih; (4) untuk mempelajari secara lebih mendalam mengenai pokok permasalahan yang diteliti, dilakukan analisa tema kultural. Analisa ini, peneliti mengintegrasikan antar lintas domain agar diperoleh penjelasan yang lebih baik. Dari informasi yang diperoleh disusun seluruh jawaban-jawaban secara etnografis untuk menggambarkan segala masalah yang ditetapkan dalam penelitian.

1.6. Kerangka Konseptual

1.6.1. Banjar Sebagai Komunitas Tradisional

Banjar merupakan kelompok sosial tradisional Bali, yang telah hidup dan ada dari zaman dahulu kala yang menjadi identitas Bali. Banjar adalah kelompok sosial yang lebih kecil dari desa adat. Bila dilihat dari tugasnya maka banjar dan desa adat terdapat perbedaan:

"Desa adat bertugas lebih mengarah kepada tugas-tugas yang bersifat sakral, sedangkan Banjar lebih bersifat untuk tugas-tugas program seperti kegiatan gotong-royong, penyelenggaraan *pesuka-dukaan*, dan dalam hubungannya dengan tugas menjaga keamanan desa dan ketertiban hidup dalam lingkungan banjar atau desa". (Dherana, 1975:14).

Banjar tidak hanya merupakan kesatuan wilayah, tetapi juga kesatuan adat dan keagamaan. Namun dalam hal desa adat sebagai lembaga adat adalah penggerak kehidupan desa adat Bali, dan banjar sebagai pengempon dari Kahyangan Tiga

karena banjar adalah bagian dari desa adat. Kahyangan Tiga yang terdiri dari Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem, diyakini oleh krama banjar dan desa sebagai salah satu penyebab kebahagiaan dan kerahayuan. Pura Desa adalah tempat suci untuk memuja Dewa Brahma, pencipta segala sesuatu, Pura Puseh tempat memuja Dewa Wisnu yang memelihara segala ciptaan, dan Pura Dalem tempat memuja Dewa Siwa yang melebur dan mengembalikan ke asalnya. Oleh karena itu kedudukan Kahyangan Tiga sangat penting dalam banjar. Untuk definisi banjar secara lengkap dijelaskan dalam bab III. Sebab Kahyangan Tiga tersebut sebagai pelindung kehidupan bersama. Dalam hal ini konsep arah bagi orang Bali sangat penting artinya. Pura Desa diletakkan pada arah gunung (kaja), Pura Dalem pada arah laut (*kelod*) sama artinya dengan arah *teben* (Dherana, 1975:5).

Jadi dalam hal yang keramat diletakkan pada arah gunung, hal yang biasa diletakkan pada arah laut. Dengan demikian banjar dan desa adat merupakan masyarakat yang sosio-religius, banjar lebih sekuler dan desa adat lebih menjurus ke religius.

1.6.2. Kebudayaan Bali

Secara umum kebudayaan adalah segala tindakan manusia. Namun secara akademik, kebudayaan mempunyai batasan tersendiri. Kebudayaan berasal dari kata budhayah (*sansekerta*) yang berarti budhi atau kekal. Sedangkan *culture* (Inggris) berasal dari kata *colere* (Latin) yang berarti mengolah, mengerjakan. Koentjaraningrat memberi batasan tentang kebudayaan sebagai segala sesuatu yang diciptakan oleh akal, rasa, dan kehendak (Koentjaraningrat, 1985:180-181).

Pada dasarnya pengertian kebudayaan disamakan dengan kesenian dalam arti sempit dan secara luas kebudayaan akan mencakup seluruh aktifitas kehidupan manusia. Dilihat dari segi wujud, maka kebudayaan tersebut memiliki tiga wujud, yaitu; (1) sebagai kelompok ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan dan sebagainya; (2) sebagai suatu komplek aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat; (3) sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Manusia dalam kaitannya dengan wujud kedua dari kebudayaan tersebut adalah makhluk sosial yang cenderung mengadakan hubungan dengan sesamanya yang akhirnya membentuk suatu masyarakat. Manusia mengadakan interaksi dan komunikasi bertujuan meneruskan tata nilai, gagasan, dan keyakinan serta pengetahuan dan tradisi yang mereka miliki, maka kelompok sosial yang berbentuk itu dapat memberikan ciri khas sebagai bentuk kelompok sosial yang nyata.

Demikian juga kelompok sosial tersebut memperlihatkan wujudnya sebagai bentuk tanggapan aktif manusia dalam merespon lingkungannya. Pada berbagai bentuk kelompok sosial terwujud suatu bentuk komunitas, seperti komunitas petani, komunitas nelayan dan sebagainya.

Kebudayaan Bali sangat erat kaitannya dengan adat dan agama yang dianut (Hindu). Secara operasional kebudayaan Bali sejalan dengan perkembangan hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan. Ketiga hubungan ini biasa disebut *Tri Hita Karana* yang diyakini sebagai sumber kebahagiaan.

Banjar adalah salah satu ciri khas kebudayaan Bali, sebagai kelompok sosial yang didasarkan atas kesatuan wilayah dan keagamaan. Melalui Banjar nilai dan tradisi Bali (Hindu) dapat diwariskan dan dilestarikan.

1.6.3. Sistem Sosial Masyarakat Bali

Sistem sosial masyarakat Bali kental sekali dengan stratifikasi, yaitu sistem kasta. Dasar stratifikasi sosial masyarakat Bali adalah hasil akulturasi antara sistem kasta yang berakar dari agama dan kebudayaan dengan sistem kekerabatan orang Bali yang bersifat patrilineal. Atas dasar seperti itu. Kedudukan orang Bali dalam suatu kasta tertentu ditentukan oleh keturunan kasta ayahnya, bila ayahnya Brahmana, maka anaknya berkasta Brahmana. Bila Bapaknya berkasta Ksatria, maka anaknya kasta Ksatria, dan bila Bapaknya berkasta Weisya maka anaknya berkasta Weisya juga dan demikian pula kasta Sudra. Hal ini berlaku dahulu, sedangkan sekarang sudah tidak berlaku karena kasta itu bukan milik orang Bali atau di Bali itu sesungguhnya salah pengertian yang sudah berabad-abad, melainkan yang dikenal atau yang digunakan sebenarnya adalah Catur Warna.

Secara teoritis Sorokin (dalam Syani, 1995:73-74) mengajukan pandangannya terhadap sistem pelapisan sosial masyarakat dapat dilihat pada; (1) pemilikan atas kekayaan yang bernilai harmonis; (2) status atas dasar fungsi dalam pekerjaan; (3) kebolehan seseorang dalam beragama; (4) status berdasarkan keturunan; (5) status atas dasar ras dan lamanya seseorang atau kelompok tinggal di suatu tempat; (6) status atas dasar jenis kelamin dan umur seseorang. Pada umumnya seseorang yang lebih tua dihormati.

Pada masyarakat Bali kerabat-kerabat atau klen kecil (*clan*) adalah berupa *dadia*. Dalam *dadia* ini mereka merasakan bahwa mereka berasal dari satu asal-usul atau keturunan, dengan ditandai oleh adanya satu tempat pemujaan leluhur yang disebut *kawitan*, *sanggah kemulan*, yang dihormati dan dijunjung tinggi oleh anggota *dadia* (Parthiana, 1984:238-239). Secara utuh kehidupan tersebut dapat dilihat dalam lingkup banjar, baik yang berkaitan dengan masalah kedudukan warga dengan kastanya yang masih melekat maupun dengan pola perkawinan yang berlaku di kalangan warga kasta tersebut.

Dalam melihat kasta di lingkungan banjar, selintas tidak terlihat adanya gejala apabila dilihat secara tersamar dari kedudukan atau mungkin kekayaan. Karena apabila dilihat, golongan Sudra untuk saat ini akan lebih banyak menduduki posisi/pengurus banjar, dan banyak di antara mereka yang sudah berhasil baik dari kekayaan maupun jabatan.

Masyarakat dan lingkungan sama-sama mengalami perubahan dan perkembangan, oleh sebab itu manusia harus menyelenggarakan proses adaptasi sosial budaya yang dinamis, agar dapat menyesuaikan dirinya dengan perkembangan dan perubahan lingkungan fisik dan sosial budayanya (Bennet, 1976:15). Masyarakat keturunan etnik Bali yang berdomisili di daerah transmigrasi tentunya memiliki lingkungan fisik dan sosial budaya yang berbeda dengan apa yang terdapat di pulau Bali, oleh sebab itu komunitas Bali di daerah transmigrasi harus pandai menyesuaikan dirinya dengan lingkungan baru tersebut.

1.6.4. Teori Fungsional dan Perubahan Sosial

Penelitian ini berupaya mengkaji eksistensi *hanjar adat* berusaha dikaji berdasarkan teori fungsional untuk menjelaskannya. Eksistensi suatu komunitas atau masyarakat, menurut teori fungsional, bergantung pada fungsi penting dalam memelihara eksistensi dan stabilitas masyarakat. Secara singkat, teori fungsional memiliki asumsi dasar bahwa segala sesuatu, termasuk struktur masyarakat dapat bertahan karena berfungsi bagi lainnya. Demikian sebaliknya, keberadaan segala sesuatu akan hilang, bila tidak berfungsi lagi. Tokoh-tokoh yang menganut teori fungsional, antara lain Emile Durkheim, R. K. Merton, dan Malinowski.

Ada beberapa pokok pikiran dalam teori fungsional adalah sebagai berikut;

1. Masyarakat merupakan system yang komplek yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling tergantung dan setiap bagian tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap bagian-bagian lainnya.
2. Setiap bagian dari masyarakat eksis karena bagian tersebut memiliki fungsi dalam memelihara eksistensi dan stabilitas satu bagian tertentu dari masyarakat dapat diterangkan apabila fungsinya bagi masyarakat sebagai keseluruhan dapat diidentifikasi.
3. Semua masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengintegrasikan, yaitu mekanisme yang dapat merekatkan menjadi satu; salah satu bagian mekanisme itu adalah komitmen para anggota masyarakat kepada serangkaian kepercayaan dan nilai yang sama.

4. Masyarakat cenderung mengarah kepada suatu keadaan equilibrium atau homeostatis, dan gangguan pada salah satu bagian cenderung menimbulkan penyesuaian pada bagian lainnya agar tercapai hamoni dan stabilitas.
5. Perubahan social, merupakan kejadian yang tidak biasa dalam masyarakat, tetapi bila toh terjadi juga, maka perubahan itu akan membawa konsekuensi-konsekuensi yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan, (Sanderson, 1993:9).

Berdasarkan dasar pokok pikiran tersebut di atas, maka persoalan eksistensi sebuah masyarakat adalah pada persoalan fungsi (pokok pikiran kedua). Namun demikian, kondisi stabil dalam masyarakat sangat tergantung pada komitmen anggotanya akan nilai dan kepercayaan yang ada; diproduksi dan dipegang sebagai pedoman hidup bersama (pokok pikiran ketiga).

Durkheim menegaskan bahwa yang dapat mempersatukan masyarakat adalah kepercayaan dan ritus keagamaan untuk memperkuat ikatan-ikatan sosial di mana kehidupan kolektif itu bersandar (Johnson, 1986:199). Dengan kata lain, solidaritas merupakan perekat ikatan-ikatan sosial, di mana ritus dan kepercayaan keagamaan menempati peranan penting. Solidaritas dalam masyarakat juga dapat berupa solidaritas mekanik dan organic. Solidaritas dalam masyarakat yang masih sederhana bersifat mekanik, bersifat otomatis, karena adanya komitmen bersama akan pedoman hidup yang sama. Sedangkan dalam masyarakat yang kompleks, solidaritas bersifat organic, sebab bagian-bagian tersebut sama seperti organ tubuh yang bekerja sendiri-sendiri namun mempunyai keterkaitan fungsi secara keseluruha.

Perubahan dalam masyarakat, menurut teori fungsional dengan demikian, hanyalah suatu kondisi antara menuju suatu keseimbangan baru. Namun demikian bukan berarti perubahan tidak perlu dipersoalkan. Menurut Gillin dan Gillin;

“Perubahan-perubahan social adalah suatu variasi dari cara-cara hidup yang diterima, yang disebabkan baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan materiil, komposisi penduduk, ideology, maupu karena adanya difusi ataupun penemuan baru dalam masyarakat tersebut”.

Sementara itu secara singkat Samuel Koening mengatakan bahwa perubahan-perubahan sosial menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola kehidupan manusia. Modifikasi tersebut terjadi karena sebab-sebab intern maupun sebab yang ekstem (Soerjono Soekanto, 1997:285).

Sedangkan Selo Soemardjan menyatakan bahwa:

“Perubahan-perubahan social adalah segala sesuatu perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi system sosialnya, termauk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perikelakuan diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat” (Soerjono Soekanto, 1987:285).

Dari beberapa pendapat mengenai peubahan sosial di atas dapat diambil beberapa pokok pikiran, yaitu, sebab adanya perubahan, apa saja yang berubah, dan akibat-akibat perubahan. Sebab perubahan pada ininnya berasal dari dalam dan luar, yang dapat berupa inovasi, alam, dan penduduk. Apa saja yang berubah, dapat berupa lembaga-lembaga masyarakat. Sedangkan akibat perubahan itu sendiri dapat erupa sikap, dan pola perilaku masyarakat.

Perubahan budaya terjadi pada level ide, perilaku, material atau fisik dan level organisasi sosial. Perubahan-perubahan sosial itu dapat dijelaskan secara structural, fungsional, sosio-historis, maupun dengan sosio-psikologis (Lauer, 1993:41). Artinya, perubahan sosial tidak saja dilihat dari perspektif adanya perubahan perilaku warga masyarakat, namun juga brkaitan dengan ide, fisik atau material dan organisasi sosial.

BAB II

WILAYAH DAN DEMOGRAFI LOKASI PENELITIAN

2.1. Wilayah Penelitian dan Sejarahnya

Desa Jati Bali yang dijadikan lokasi wilayah penelitian ini mempunyai kedudukan geografis sebagai berikut. Desa Jati Bali merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara, yang terletak kurang lebih 8 km dari ibu kota kecamatan, 80 km dari ibu kota kabupaten Kendari (Unaaha) dan kurang lebih 30 km dari ibu kota propinsi Sulawesi Tenggara.

Secara administratif desa Jati Bali termasuk dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Kendari dengan batas-batas wilayah adalah sebagai berikut; di sebelah Utara berbatasan dengan desa Lameuru, di sebelah Timur berbatasan dengan desa Amoito, di sebelah Selatan berbatasan dengan desa Ambaipua, di sebelah Barat berbatasan dengan desa Sindang Kasih (transmigrasi asal Jawa Barat).

Desa Jati Bali terdiri dari daerah berbukit-bukit dan daratan rendah dengan ketinggian kurang lebih 200 m di atas permukaan air laut dengan bentuk wilayah datar sampai berombak. Wilayah desa Jati Bali beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni dan musim kemarau pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember, dengan temperatur rata-rata 33 derajat celcius. Curah hujan rata-rata 200 mm pertahun. Keadaan ini tidak menetap karena sering terjadi, lebih lama musim kemarau atau sebaliknya musim kemarau

yang terjadi lebih lama daripada musim hujan yang kadang-kadang menimbulkan kesulitan bagi masyarakat desa Jati Bali, khususnya petaninya. Apabila mau menanam padi biasa mengharapkan tadah hujan, karena pengairan (irigasi) kurang baik.

Desa Jati Bali adalah daerah transmigrasi perintis atau pertama di propinsi Sulawesi Tenggara yang mulai datang pada tanggal 21 November 1968 di perkampungan yang bernama : “**Obyek Amoita**”. Nama Jati Bali merupakan nama yang diusulkan oleh pemuka masyarakat yang diwakili oleh sepuluh ketua kelompok dengan ketua rombongan adalah Bapak Gusti I Ketut Sumitro dengan anggota kelompok sebagai berikut: I Made Dener, Drs. I Nyoman Nirta, I Wayan Kingsan (Almarhum), Pan Darmo, I Made Mudiana, Pan Nurati (Almarhum), Pan Gara, Pan Luh Jepun, Pan Suardana, Pan Suwittra. Ketua kelompok-kelompok inilah yang berkumpul dan mengadakan rapat untuk membicarakan tentang nama desa yang tepat untuk digunakan sebagai sebutan desa baru tersebut. Setelah sebulan berada di perkampungan akhirnya dalam pertemuan atau sengkep pemuka masyarakat, disepakati nama desa adalah “**Jati Bali**”.

Kata “**Jati**” berarti sungguh-sungguh karena kata Jati diambil dari bahasa daerah Bali, yang artinya sungguh. Sedangkan kata Bali digunakan menjadi nama desa, ditujukan agar penduduk selalu mengingat asal-usul mereka yaitu Bali. Selain itu untuk menunjukkan kesungguhan mereka setia pada adat dan tradisi leluhurnya di Bali.



2.2. Demografi Penduduk Desa Jati Bali

Pada tahun 1999/2000 penduduk desa Jati Bali Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Kendari berjumlah 1.183 jiwa, yang terdiri dari 283 kepala keluarga. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin adalah laki-laki sebanyak 588 jiwa, dan perempuan 595 jiwa. Atau dengan sederhana dikatakan bahwa jumlah laki-laki lebih sedikit dibanding dengan jumlah penduduk perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 1.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Jenis Kelamin Dan Golongan Umur,
Desa Jati Bali Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Kendari Tahun 1999

No	Golongan Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0 - 12 bulan	13	22	35
2	01 - 04 tahun	93	57	110
3	05 - 06 tahun	53	28	56
4	07 - 12 tahun	62	55	117
5	13 - 15 tahun	40	36	76
6	16 - 18 tahun	36	38	74
7	19 - 25 tahun	75	81	156
8	26 - 35 tahun	63	62	125
9	36 - 45 tahun	63	60	123
10	46 - 50 tahun	37	33	70
11	51 - 60 tahun	75	70	145
12	61 - 75 tahun	53	50	103
13	76 lebih	2	4	6
	Jumlah	588	595	1.183

Sumber: Kantor Desa Jati Bali Dalam Angka, 1999/2000.

Sebagian besar penduduk desa Jati Bali bermata pencaharian di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan beternak. Pertanian tanaman pangan terutama pertanian lahan basah yaitu sawah dan pertanian lahan kering yaitu ladang atau berkebun. Lahan yang diperoleh penduduk merupakan hasil pemberian dari pemerintah dan ada pula yang menambah lahannya dengan cara membeli dari penduduk asli dan pendatang dari Jawa Barat (Sunda) di desa Sindang Kasih di lokasi transmigrasi.

Sistem pertanian di desa Jati Bali adalah sawah yang dikelola atau diatur dengan subak yaitu mulai turun ke sawah menanam padi sampai panen. Aturan tersebut merupakan tradisi masyarakat Bali dalam bidang pertanian. Tradisi tersebut ternyata telah menggerakkan penduduk untuk bekerja dengan kompak dalam pertaniannya. Dengan sistem subak tersebut petani desa Jati Bali, jika menanam padi mengandalkan air hujan, dan melakukan penanaman padi dalam waktu yang bersamaan. Demikian juga dalam waktu panen.

Selain tanaman pangan, penduduk juga menanam tanaman sayuran untuk konsumsi warga sendiri, seperti tanaman kacang panjang, buncis, terong, lombok, bayam, mentimun, periyaya, labu siam, dan sebagainya. Untuk melengkapi kebutuhan konsumsi penduduk menanam tanaman buah, seperti jambu mente, jambu biji, mangga, rambutan, nanas, dan sebagainya.

Selain bertani dan berkebun, penduduk desa Jati Bali juga bermata pencaharian lain, yaitu; pegawai negeri sipil/ABRI, wirausaha, pedagang, tukang, dan dukun bayi. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 2.

Tabel 2

Penduduk Desa Jati Bali Dan Perincian Menurut Mata Pencaharian.

No	Jenis Mata Pencaharian	Pria	Wanita	Jumlah
1	Pertanian/arti luas	645	-	645
2	Pegawai negeri swasta	30	20	50
3	ABRI	10	2	12
4	Pedagang	10	15	25
5	Dukun bayi	2	2	4
6	Tukang	55	-	55

Sumber: Kantor Desa Jati Bali Dalam Angka, 1999/2000. Tabel 2

2.3. Alat Transportasi di Desa Jati Bali

Pada masa yang lalu, daerah transmigrasi, khususnya Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Kendari, mempunyai sarana angkutan hanya satu, yaitu truk dari Angkatan Udara TNI. Sarana transportasi yang ada sekarang berkembang sesuai dengan jaman. Hal tersebut sangat membantu dalam kelancaran kegiatan penduduk dan memudahkan komunikasi dengan daera-daerah lain di sekitarnya. Khusus dalam perdagangan akan sangat membantu memasarkan hasil pertanian dan perkebunan mereka. Dengan demikian perekonomian dapat berjalan dengan lancar. Secara jelas jenis alat transportasi yang ada di desa Jati Bali adalah sebagai mana dalam tabel 3.

Tabel 3
Keadaan sarana transportasi desa Jati Bali

No	Jenis Kendaraan	Jumlah	Keterangan
1	Mikrolet	7	
2	Mobil pribadi	5	
3	Truk	1	
4	Sepeda motor	25	
5	Sepeda	49	

Sumber : Kantor desa Jati bali dalam angka, 1999/2000.

2.4. Lahirnya Banjar Adat Bali di Desa Jati Bali

Pada masa awal pembentukan desa Jati Bali, peranan ketua kelompok dari daerah asal Bali sangat menentukan. Seperti halnya dalam menentukan nama desa, yang diputuskan oleh musyawarah ketua-ketua kelompok (sepuluh kelompok), maka pembentukan banjar adat di daerah transmigrasi juga didasarkan musyawarah. Namun demikian untuk menentukan daerah atau wilayah banjar, dipergunakan sistem kewilayahan atau lokasi. Dengan demikian di desa Jati Bali terbentuk tiga banjar adat, yaitu; banjar adat dusun satu (Nusa Indah), banjar adat dusun dua (Mekar Indah) dan banjar adat dusun tiga (Sari Indah). Penetapan banjar tersebut masih menggunakan istilah dusun, seperti pembagian wilayah pada umumnya di desa-desa luar masyarakat Bali. Dengan adanya tiga dusun yang ditempati oleh masyarakat Bali tersebut, maka dusun-dusun tersebut secara otomatis menjadi banjar adat.

Dengan demikian, di desa Jati Bali tradisi Bali masih sangat kuat dipegang dan dilestarikan di daerah transmigrasi. Secara istilah, maka ada dua banjar, yaitu banjar adat (suka duka) dan banjar dinas. Dalam pengertian umum (undang-undang

tentang pemerintahan di daerah) yang disebut desa adalah Banjar Dinas. Di desa Jati Bali, berarti dalam Banjar Dinas terdapat tiga banjar adat, yang dikepalai oleh ketua adat. Sehingga ketua adat di desa Jati Bali meliputi ketiga banjar adat yang ada, yaitu Nusa Indah, Mekar Indah, dan Sari Indah.

Terbentuk banjar adat tersebut, tidak begitu saja mudah diterima oleh seluruh masyarakat yang ada di desa Jati Bali, oleh karena masyarakat yang bertempat pada suatu tempat itu, berasal dari berbagai kabupaten yang ada di Bali, sehingga mereka semuanya bertahan dan memperlihatkan kebolehan atau semuanya membawa adat yang berasal dari Bali, yang semuanya berbeda-beda, misalnya adat dari Kabupaten Tabanan berbeda dengan adat dari Kabupaten Badung dan lain-lainnya. Demikian pula disebabkan terbenturnya dengan peraturan pemerintah.

Pertemuan adat Bali dengan adat setempat pada awalnya tidak mudah. Penduduk asli Tolaki (muslim) menjauh dengan orang Bali. Hal tersebut dapat dimengerti karena ada perbedaan persepsi tentang Babi. Penduduk Tolaki mengharamkan Babi, sedangkan masyarakat Bali tidak. Perbedaan tersebut, sampai menimbulkan sikap yang kurang harmonis. Seiring dengan berjalannya waktu, kurang lebih tiga tahun kondisi tersebut sudah berubah, karena adanya saling memahami antar warga. Dengan begitu, penduduk selain masyarakat Bali, lama-kelamaan juga menerima keberadaan banjar adat dalam wilayah desa Jati Bali. Rasa saling pengertian tersebut sangat berarti, sebab banjar adat bagi orang Bali adalah sangat penting, sehingga kedudukannya lebih tinggi dibanding pemerintahan desa yang ada secara tradisi. Kondisi demikian, dapat dipahami oleh masyarakat lainnya

sehingga keberadaan pemerintahan desa dan banjar adat dapat dipahami dan diakui eksistensinya.

BAB III

KEBERADAAN BANJAR ADAT

DI BALI

3.1. Pengertian Banjar

Kata *Banjar* adalah suatu kata asli yang terdapat di Indonesia. Kata itu terdapat dalam bahasa Bali Kuno dan Jawa Kuno. Dalam bahasa Jawa Kuno kata Banjar yang berarti baris atau lingkungan (Wojowasito, 1973:200). Kata banjar dapat pula berarti *jajar* atau berderet ke samping. Dari kata *jajar* itulah muncul istilah *jajaran*. Kata banjar dapat pula berarti kelompok, seperti dalam kata *mabanjar* yang artinya masuk kelompok. Mengenai kata banjar ada disebutkan dalam prasasti Gobleg Pura Desa berangka tahun 836 caka atau 914 Masehi yang memakai bahasa bali Kuno, yang berbunyi:

“sambar mas pi bras karu l banjar di Indrapura ...”

yang artinya:

“untuk tempat sembahyang (pura) dikenal mas satu piling dan beras satu batok kelapa untuk lengkungan atau kelompok Indrapura...”

Di bagian lain ada disebutkan:

“...ser tumggalan banjer di Indrapura...”

yang artinya:

“...pengawasan bernama tumggalan untuk lingkungan atau kelompok Indrapura...(Purwita, 1984:4).

Pengertian banjar disebutkan pula dalam kamus Bali-Indonesia,

yaitu:

"Kata Banjar mempunyai dua pengertian yaitu banjar yang berarti kelompok terkecil dalam organisasi desa masyarakat Bali dan banjar yang berarti kampung. Mebanjar berarti masuk anggota organisasi banjar, turun membanjar berarti ia sudah menjadi anggota organisasi banjar. Banjaran berarti mempergunakan tenaga anggota banjar" (Kamus Bali-Indonesia, 1978:72).

Pengertian banjar dalam kaitannya dengan desa adat di Bali adalah kelompok masyarakat yang lebih kecil dari desa adat dan menjadi bagian dari desa-adat serta merupakan persekutuan hidup sosial, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah (Purwita, 1984:50). Kadang-kadang besarnya desa sama dengan banjar, terutama desa yang kecil.

Kelompok sosial dalam masyarakat Bali, sebenarnya terdapat bermacam-macam kelompok sosial. Berdasarkan hal tersebut, maka banjar adalah kelompok sosial yang didasarkan pada persekutuan hidup setempat atau kesatuan wilayah. Sedangkan dalam masyarakat Bali dikenal pengelompokan sosial yang lain, yaitu:

1. Pengelompokan sosial yang berdasarkan atas persekutuan kekerabatan. Sebagai contoh nampak dalam sebutan tunggal-sanggah atau tunggal-kawitan.
2. Pengelompokan sosial yang berdasarkan atas siwa; maksudnya pengelompokan sosial yang didasarkan atas seorang pendeta yang dijadikan pimpinan bersama dalam penyelenggaraan upacara keagamaan. Kelompok sosial ini disebut sisya, sedangkan pemimpinnya disebut siwa.

3. Pengelompokan sosial yang mempunyai tujuan tertentu dalam suatu usaha bersama disebut *seka* seperti; *sekaa-manyi*, *sekaa-semal*, *sekaa-mamula*, *sekaa-numbeg*, dan sebagainya.
4. Pengelompokan sosial yang didasarkan atas suatu kebaktian dalam suatu tempat suci atau pura yang disebut *pamakasan*, seperti *pamakasan Pura Dalem*.
5. Pengelompokan sosial yang didasarkan atas kebersamaan dalam suatu sistem pertanian tradisional yang disebut *subak* atau *krama-carik*.
6. Pengelompokan sosial yang didasarkan atas kesenangan dalam suatu hiburan yang juga disebut *sekaa*; seperti: *sekaa-gong*, *sekaa-drama*, *sekaa-arja*, *sekaa-tuak* dan sebagainya.

Demikianlah masyarakat Bali dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, ada yang berasaskan kekeluargaan, kebersamaan, dan rasa bakti.

Sebagai kelompok sosial yang lebih kecil dari desa adat, maka banjar tidak bisa lepas dari tiga unsur yang menyebabkan adanya kesejahteraan, kebahagiaan atau karahayuan dalam hidup dan kehidupan semua makhluk hidup, yang dikenal dengan istilah **Tri Hita Karana**. Tiga unsur penyebab kebahagiaan yang disebut dengan **Tri Hita Karana** adalah:

1. Adanya pelemahan yaitu wilayah suatu banjar dengan batas-batasnya yang tetap.
2. Adanya Pawongan yaitu warga banjar (*krama banjar*) yang menjadi pendukung suatu banjar.
3. Adanya Parahyangan yaitu merupakan tempat suci untuk memuja Hyang Widhi sebagai pujaan bersama yang diwujudkan dalam Pura yang ada di banjar sebagai penyungsong *krama banjar*.

Berdasarkan **Tri Hita Karana**, membuktikan bahwa banjar di samping sebagai kesatuan sosial, juga merupakan kesatuan wilayah dan kesatuan keagamaan. Sesuai peraturan pemerintah yang berlaku, maka di Bali terdapat dua jenis desa, yaitu; desa adat dan desa dinas. Desa dinas merupakan kesatuan wilayah administrasi terkecil dalam suatu susunan wilayah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan desa adat adalah suatu kesatuan atau persekutuan wilayah yang berdasarkan atas kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan yang diwarisi secara turun-temurun serta diikuti oleh suatu Kahyangan Tiga yaitu; Pura Desa, Pura Puseh dan Pura Dalem. Kedua desa tersebut diakui keberadaannya dalam masyarakat Bali. Kenyataannya hubungan antara kedua desa tersebut sangat bervariasi, yaitu:

1. Ada satu desa dinas yang sama wilayahnya dan penduduknya dengan desa adat atau dengan kata lain desa adat = desa dinas.
2. Ada satu desa dinas yang meliputi beberapa desa adat atau dengan kata lain desa dinas > desa adat.
3. Ada beberapa desa dinas berada dalam satu wilayah desa adat atau dengan kata lain desa adat > desa dinas.
4. Ada wilayah desa dinas yang meliputi sebagian desa adat tertentu dan sebagian desa adat lainnya.

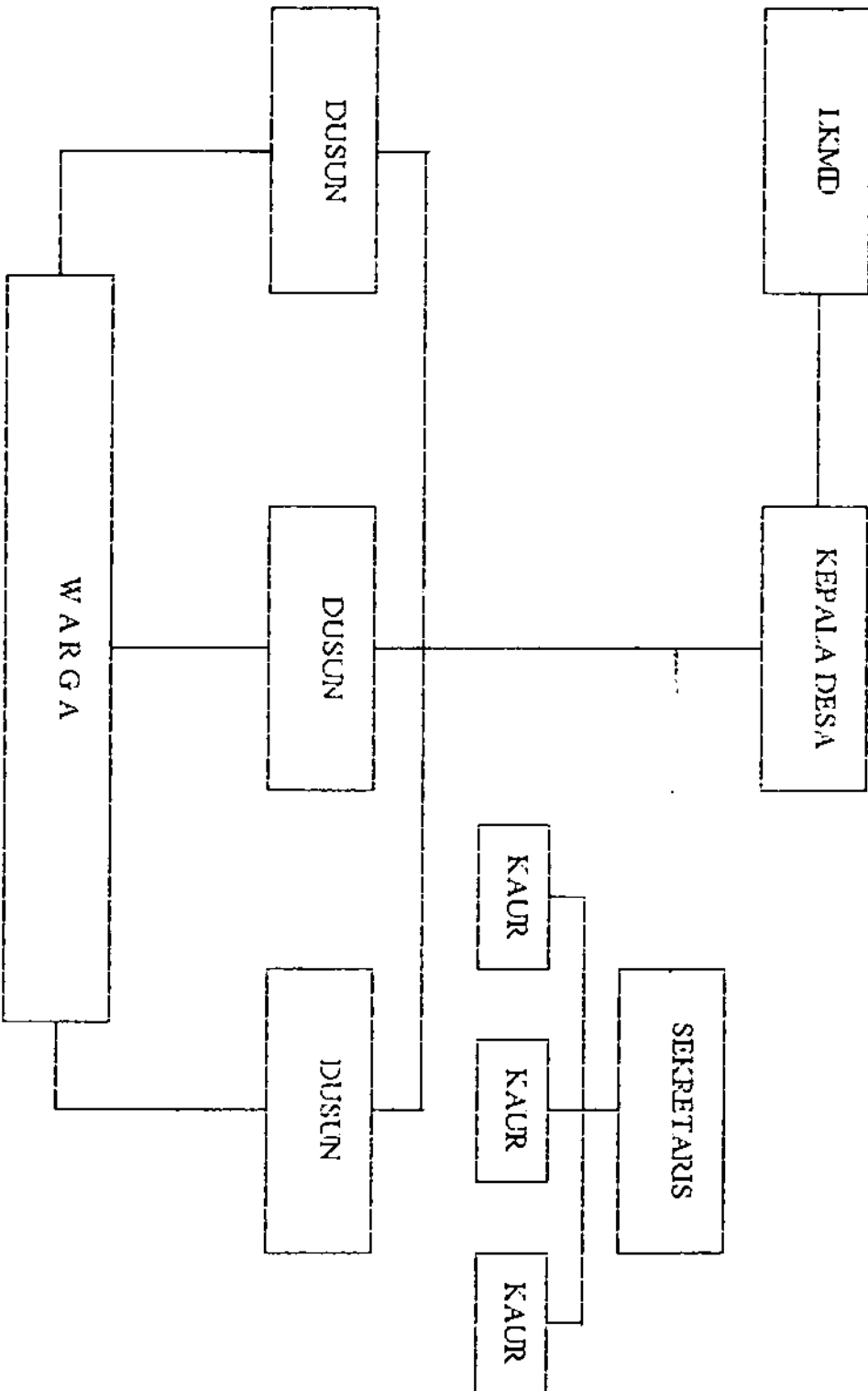
Dalam pengertian desa dinas dan desa adat di atas dapat dikatakan dengan ungkapan lain, bahwa desa dinas adalah desa seperti apa yang dipahami dan tercantum dalam perundang-undangan tentang pemerintah di daerah yang berlaku dan ini bisa disebut banjar dinas. Sedangkan desa adat lebih mudah disebut banjar adat.

3.2. Struktur Organisasi Banjar Dinas

Banjar dinas hanya ada dalam struktur desa dinas (administratif). Desa dinas merupakan sub-pemerintahan yang paling rendah di bawah kecamatan. Struktur organisasi desa dinas tersebut adalah sebagai berikut. Kepala Desa dibantu dengan sekretaris, bendahara, dan kepala urusan. Kepala desa membawahi beberapa wilayah yang lebih kecil yang biasa disebut dusun.

Dusun tersebut sering diidentikkan dengan banjar dinas. Dusun dikepalai oleh kepala dusun yang membawahi beberapa ketua RT (Rukun Tetangga). Dan RT juga dibantu oleh sekretaris dan bendahara, serta membawahi sejumlah warga. Struktur banjar dinas tersebut dapat dilihat dalam bagan 1.

BAGAN 1
STRUKTUR ORGANISASI
DESA DINAS DI BALI

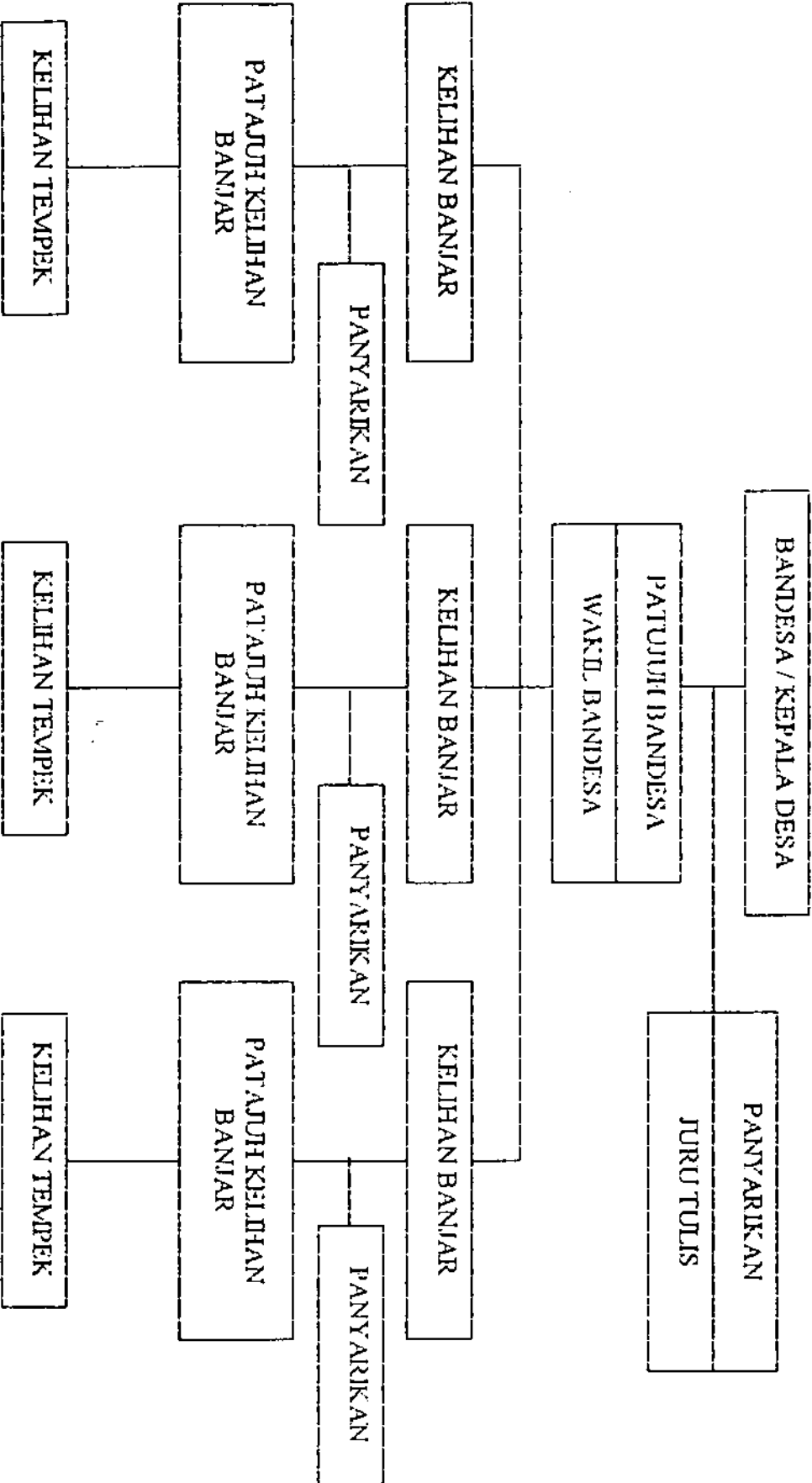


3.3. Struktur Organisasi Banjar Adat

Banjar di Bali, dapat dibedakan atas banjar yang besar dan banjar yang kecil menurut jumlah anggotanya. Bagi banjar yang anggotanya lebih dari 50 keluarga (kuren), biasanya digolongkan sebagai banjar besar, sedangkan yang kurang dari 50 keluarga digolongkan sebagai banjar kecil. Dalam banjar yang besar dibagi-bagi lagi dalam tempek-tempek. Struktur organisasi banjar adat di Bali sangat bervariasi, namun demikian pada umumnya mempunyai struktur sebagai berikut:

1. Klihang banjar, sebagai pemimpin dari banjar itu sendiri.
2. Klihang banjar dibantu oleh seorang juru tulis yang disebut Panyarikan. Di beberapa daerah, banjar-banjar tidak mengadakan Panyarikan, melainkan langsung dirangkap oleh Klihang Banjarnya.
3. Di bawah Klihang Banjar adalah Kasinoman yang juga disebut Juru-arrah. Jumlah kasinoman adalah menurut besar kecilnya jumlah anggota, biasanya berkisar antara dua dan empat orang. Tugas Kasinoman adalah membantu Klihang Banjar dan terutama sekali sebagai penghubung Klihang Banjar dengan annggotanya.
4. Di bawa Kasinoman, adalah anggota banjar yang disebut krama-banjar.
5. Bagi banjar besar yang terbagi atas tempek-tempek, maka masing-masing tempek mempunyai Klihang Tempek yang dibantu oleh seorang Juru-arrah. Kedudukan Klihang Tempek adalah di bawah Klihang Banjar. Dalam hal yang demikian itu Klihang Banjar adalah memimpin tempek-tempek itu dan mengkoordinasikannya. Ada pula tempek-tempek yang tidak mempunyai Klihang Tempek, melainkan hanya mempunyai seorang juru arah saja. Secara singkat struktur organisasi banjar adat tampak dalam bagan 2.

BAGAN 2
 STRUKTUR ORGANISASI
 DESA / BANJAR ADAT DI BALI



3.4 Keanggotaan Banjar (Krama Banjar)

Mereka yang dapat menjadi anggota banjar (krama banjar) adalah mereka yang memenuhi syarat sebagai berikut: (1) orang yang sudah membentuk rumah tangga atau berkeluarga yang biasa disebut *mapakuren* atau *makurenan*. Orang yang demikian itu di dalam kehidupan masyarakat telah berubah status yaitu bujangan (teruna) menjadi tua atau status hidup dari Brahmacari (masa muda) ke Grhastha (masa berumah tangga). Setelah mereka berkeluarga secara otomatis mereka masuk sebagai anggota banjar yang sering disebut dengan turun mebanjar atau ikut menjadi krama banjar; (2) mereka yang telah memiliki sebidang tanah pekarangan; (3) anggota banjar pendatang yaitu orang yang berasal dari luar banjar atau luar desa adat tetapi kemudian menjadi anggota banjar. Mereka mengajukan permohonan menjadi anggota organisasi banjar kepada Kelihang Banjar, kemudian anggota baru biasanya diterima secara resmi setelah dilakukan rapat pleno (paruman) banjar dan setelah melalui upacara pemberitahuan di Pura (Upakara Matur Piuning).

Untuk menentukan keanggotaan banjar ada dua sistem yang biasa dipergunakan yaitu; sistem karang ayahan dan sistem *mapakuren* (Purwita, 1984:24). Sistem *karang ayahan* adalah sistem yang berdasarkan pada aturan tanah yang merupakan wilayah desa di mana krama banjar itu berada; yang berstatus tanah desa. Mereka yang menempati atau bertempat tinggal di dalam tanah tersebut di kenal ayahan desa, yaitu mereka wajib kerja untuk desa dan dikenai juga materi (papeson), misalnya pada saat ada anggota banjar yang melakukan yadnya, mereka memberikan materi seperti daun kelapa (busung), beras dua liter, kelapa empat biji dan lain-

lainnya. Semua kewajiban ini dinamakan dengan ayahan, hal tersebut merupakan akibat dari menempati tanah desa.

Setiap anggota banjar mempunyai hak dan kewajiban yang melekat dalam dirinya. Hal tersebut merupakan konsekuensi hidup dalam suatu sistem sosial adat, di mana nilai-nilai tradisi mengikat perilaku anggotanya. Secara garis besar kewajiban anggota banjar adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kewajiban berupa tugas krama banjar antara lain; membantu anggota dalam menyelenggarakan upacara Dewa Yadnya, Pitra Yadnya, Manusa Yadnya dan Resi Yadnya. Menyelenggarakan penguburan jenazah anggota krama banjar. Membantu anggota lain dalam keadaan bahaya dan ditimpa musibah. Menyelenggarakan tugas banjar rutin secara bergilir misalnya; menjadi kasinoman, menyelenggarakan aci (upacara kecil seperti masegeh, mabanten sodan) pada hari-hari tertentu secara periodik di lingkungan anggota krama banjar dengan sistem urak. Melaksanakan kerja bakti untuk kepentingan banjar.
2. Setiap anggota banjar wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku bagi krama banjar, yaitu; awig-awig yang tertulis maupun tidak, paswara dan sima yang berlaku. Selain itu wajib menjaga kemandirian dan ketertiban lingkungan. Kewajiban yang paling menonjol adalah gotong royong dalam persekutuan bersama.
3. Melaksanakan kewajiban-kewajiban yang merupakan kewajiban warga desa adat.

Sedangkan hak anggota krama banjar dapat dilihat dari mekanisme kehidupan krama banjar di mana mereka memberikan hak-hak tertentu kepada anggotanya sebagai imbalan atas kewajiban-kewajiban yang diterimanya, antara lain;

(1) setiap anggota banjar berhak dipilih dan memilih sebagai pengurus banjar (para juru); (2) setiap anggota banjar berhak mengeluarkan pendapat pada saat rapat; (3) setiap anggota berhak menggunakan fasilitas milik banjar dan milik desa adat; (4) setiap anggota banjar berhak mendapat bantuan atau pertolongan dalam keadaan bahaya baik dari dalam maupun dari luar; (5) setiap anggota berhak mendapat bantuan tenaga untuk keperluan menyelenggarakan upacara keagamaan.

Dalam keanggotaan krama banjar dapat sewaktu-waktu diberhentikan karena beberapa alasan, antara lain; (1) berhenti karena pindah tempat tinggal. Dalam hal ini yang bersangkutan mohon berhenti dengan hormat karena pindah tempat tinggal ke luar wilayah banjar yang semula dan mereka memasuki anggota banjar lain yang mewilayahkan pekarangan tempat tinggalnya yang baru; (2) berhenti karena usia lanjut dan digantikan oleh anaknya. Di Bali ada dua sistem dalam penggantian anggota krama banjar seperti ini. Ada desa adat yang memakai sistem penggantian, bila anaknya laki-laki tertua telah kawin, maka keanggotaannya krama banjarnya diganti oleh anak yang tertua atau diganti oleh anaknya termuda yang sudah berkeluarga; (3) berhenti karena diberhentikan dengan tidak hormat oleh krama banjarnya yang disebabkan oleh suatu kesalahan terhadap krama banjarnya. Pemberhentian ini diiringi dengan sanksi sosial atau sanksi adat dalam masyarakat. Berhenti secara tidak hormat dari krama banjar otomatis berhenti pula dari keanggotaan krama desa. Keanggotaan bisa dikembalikan setelah mereka mengajukan permintaan maaf kepada krama banjar dan memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan oleh krama banjar.

3.5: Aturan-Aturan (Awig-Awig) Dalam Banjar

Peraturan banjar disebut dengan "awig-awig" yang mempunyai tujuan bersama. Dalam suatu komunitas seperti banjar atau desa, aturan dan adat istiadat yang ada mempunyai akibat hukum yang di sebut hukum adat. Dalam hal ini sulit membedakan mana adat yang mempunyai sanksi hukum dan mana yang hanya mempunyai sanksi adat dari banjar. Kebiasaan-kebiasaan atau yang sering disebut dengan adat mempunyai sanksi secara bertingkat yaitu sanksi peringatan adat atau pemberitahuan secara lisan, kemudian denda dan akhirnya sampai dengan pemecatan. Awig-awig adat ini bisa mempunyai sanksi hukum apabila tingkat pelanggarannya sudah semakin tinggi dalam artian pelanggaran dilakukan secara berulang-ulang, maka sanksi hukum akan dikenakan kepada pelanggarnya.

Hukum adat di Bali tidak dapat dipisahkan dari agama Hindu yang menjadi pedoman hidup masyarakat. Banyak sastra yang melandasi adat dan hukum adat di bali yang jiwanya masih berlangsung samapai sekarang. Adapun sastra-sastra itu termuat dalam beberapa pustaka rontal yaitu; Purwadigma, Adigama, Agama, Ciwisasana, Manusasama, Wrtisasama, Kuttaramanawa, Sarasamucaya, Dewadanda, Dewagama, Dharmaupapati, Nagarakrama, Dewasasana, Silakrama, Paswara dan lain-lainnya. Dari sastra-sastra tersebut berlanjut menjadi hukum adat yang dikukuhkan melalui awig-awig dan paswara. Awig-awig dan paswara disusun berlandaskan sastra agama dan sasana. Dengan demikian awig-awig dalam masyarakat mengambil aturan-aturan yang ada dalam agama Hindu.

Untuk lebih jelasnya dapat disampaikan isi awig-awig dengan membagi menjadi tiga sukerta (bagian); (1) Sukerta tata pekraman, yaitu segala yang memuat

aturan-aturan yang berhubungan dengan krama, prajuru, paruman, kulkul dan milik banjar; (2) Sukerta tata agama adalah segala yang memuat tentang hal yang berhubungan dengan Panca Yadnya; (3) Sukerta tata pawongan adalah segala hal yang berhubungan dengan keanggotaan banjar (pawongan) seperti perkawinan, perceraian, tentang hukum yang dijatuhkan bila ada krama yang melanggar.

Mengenai krama yang umumnya dibedakan golongannya berdasarkan atas beberapa ukuran, yaitu; krama banjar ngarep, krama banjar patus, krama banjar pangele, krama banjar telu meton dan krama banjar penumpang. Hal ini didasarkan atas hukum dan kewajiban yang berbeda-beda. Berikut ini disampaikan mengenai contoh awig-awig, yaitu:

1. Parareman krama banjar kamarging nyabran enam sasih ring rahina Galungan (buda Kliwon Dungulan).
2. Parareman krama banjar kangkat kamargiang/kalaksanayang napkala, ritatkala wentan bawos utawi pikamkam sane mabuat" (awig-awig banjar Gelogor Desa Adat Denpasar, 1989:9).

Artinya:

1. Rapat anggota banjar dilaksanakan tiap enam bulan sekali pada Hari Raya Galungan.
2. Rapat anggota banjar boleh dilaksanakan apabila ada masalah yang sangat mendesak atau perlu dipecahkan.

"Babewosan sane sempun kasumanggeming ring para reman banjar sane durung munggah ring awig-awig dados anggen sima sane patut kanut antuk krama banjar sami" (awig-awig Banjar Gelogor Desa Adat Denpasar, 1989:9).

Artinya:

"Segala keputusan yang sudah disahkan melalui rapat banjar, serta belum tersurat dalam awig-awig dipakai sebagai sima yang patut dilaksanakan oleh anggota banjar".

Melihat isi dari awig-awig di atas terutama bagian kedua dapatlah kiranya dipahami terutama terhadap ketentuan-ketentuan yang belum ditulis/tercatat adalah awig-awig yang disebut sima tersebut, misalnya; (1) Kehadiran harus tepat waktu, bila melanggar dikeluarkan sanksi kasep (terlambat) dan sanksi dedosan (denda uang), bila tidak hadir berurut-turut tiga kali tanpa pemberitahuan terlebih dahulu maka kedudukannya sebagai anggota akan dicabut sesuai dengan pareman yang berlaku; (2) Barang bawaan untuk menghindari suatu sangkepan, tidak diperkenankan membawa barang-barang yang dapat mengancam keselamatan krama banjar seperti pisau dan lain-lain. Hal ini untuk menghindari apabila situasi tidak terkendali dalam sangkep dapat mengarah pada tindakan brutal; (3) Cara duduk, sangkepan (rapat) yang diselenggarakan di balai banjar yang dihadiri oleh krama banjar dan pra-juru banjar cara duduknya berhadap-hadapan antara krama banjar dengan pra-juru banjar. Pra-juru banjar mengambil mengambil tempat luanan (utara dan timur) makin keteben (selatan dan barat) adalah tempat krama banjar. Dalam hal ini mengemukakan pendapat harus secara tertib, sopan, tidak boleh mencela pembicaraan krama lain, lebih-lebih sampai menyinggung perasaan. Atas pelanggaran ini disebut pecamil.

Pecamil dari kata "camil" artinya berkata-kata yang tidak sesuai dengan desa, kala, patra termasuk berkata dengan kehendak mempengaruhi orang atau pejabat atau petugas, berkata kotor, memaki-maki tak menentukan dan sebangsanya (Kaler, 1989:26).

3.6. Pandangan Hidup dan Keyakinan Masyarakat Bali

Dalam pandangan hidup masyarakat Bali umumnya dan kehidupan desa adat khususnya sangat dipengaruhi dan dijiwai oleh budaya Bali dan agama Hindu, yang mengandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, terkandung pikiran-pikiran yang mendalam mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Masyarakat Bali menggunakan azas kebersamaan dan azas berbakti sebagai pedoman hidupnya. Dengan azas kebersamaan mendorong manusia untuk berorientasi kepada sesamanya, sedangkan azas berbakti menumbuhkan loyalitas untuk mengabdikan. Masyarakat Bali mewujudkan bakti tersebut dalam bentuk yadnya yang ditujukan kepada Tuhan (Hyang Widhi), ditujukan kepada sesama manusia serta makhluk lain dan alam sekitarnya. Pandangan itulah yang menjadi pedoman masyarakat sehingga dapat menggerakkan dan mewujudkan perbuatan-perbuatan nyata dalam wujud suka duka, gotong royong, tolong menolong dan kerja bakti dalam berbagai bidang kehidupan.

Ditinjau dari segi pelembagaannya, maka sistem gotong royong di masyarakat Bali ada dua macam; (1) gotong royong melalui jalur organisasi tradisional, seperti; subak, banjar adat; (2) gotong royong yang tidak melalui jalur organisasi sosial tradisional. Gotong royong ini bersifat tidak permanen yang sebagian besar terjadi dalam bidang ekonomi dan teknologi.

Selain itu ada juga keyakinan-keyakinan yang menjadi dasar perilaku masyarakat Bali, yaitu: (1) keyakinan terhadap Hyang Widhi, yang diyakini sebagai pencipta, pemelihara dan pelebur alam semesta. Keyakinan ini diwujudkan dalam pemujaan Kahyangan Tiga yaitu; Pura Desa, Pura Puseh dan Pura Dalem. Ketiga

pura tersebut menjadi unsur pokok desa atau banjar di Bali; (2) keyakinan akan Atman. Manusia pada hakekatnya adalah satu sesuai dengan adagium Tat Twam Asi (dia adalah engkau). Inilah yang menjadi landasan tata hidup harmonis; (3) keyakinan akan hukum karma (hukum perbuatan) yang mendorong manusia bertindak hati-hati sebab akan ada hukum akibat dari setiap perbuatannya; (4) keyakinan akan penitisan kembali, yang berarti memberikan kesempatan kepada yang hidup untuk berbuat lebih baik; (5) keyakinan akan moksa. Dengan adanya pandangan hidup seperti itu maka dapat diciptakan suasana kehidupan yang aman, tentaram, dan melahirkan rasa berkesenian, dan dapat mencapai ketenangan hidup. Nilai-nilai luhur kebudayaan Bali sebagai warisan leluhur, diwariskan secara turun temurun melalui banjar adat, yang menjadi landasan pokok dalam menciptakan kehidupan yang dicita-citakan.

BAB IV
FUNGSI DAN KEBERADAAN BANJAR ADAT
DI DAERAH TRANSMIGRASI

4.1. Fungsi Banjar Adat Di Desa Jati Bali

Sebagaimana diketahui bahwa daerah transmigrasi adalah daerah baru yang lain daripada daerah Bali. Dengan demikian keberadaan banjar di daerah baru tersebut tidak mudah diwujudkan oleh masyarakat Bali. Seperti halnya hasil-hasil studi yang dipaparkan pada bab awal oleh Fredrick Barth dan Karl G. Izikowitz tentang suku Pakthun dan suku Thai; menyimpulkan bahwa identitas khas suatu suku tidak mudah dipertahankan. Pelestarian sebuah ciri budaya dilakukan dengan alasan adanya manfaat dan mudah dilakukan. Seperti halnya banjar adat di daerah transmigrasi desa Jati Bali Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Kendari tetap dipertahankan dan dilestarikan oleh masyarakat Bali pendatang dengan mengingat arti penting dan fungsi banjar adat tersebut dalam kehidupan masyarakat Bali di manapun berada.

Secara garis besar fungsi banjar adat adalah;

1. Mengatur hubungan krama banjar (desa) dengan kahyangan.
2. Mengatur pelaksanaan Panca Yadnya agama Hindu dalam masyarakat.
3. Mengatur penggunaan kuburan.
4. Mengatur hubungan antar sesama krama banjar (desa).
5. Mengurus tanah, sawah, dan barang-barang lainnya milik desa/banjar adat.
6. Menetapkan sanksi-sanksi bagi pelanggaran terhadap hukum adat (awig-awig).

7. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian dalam masyarakat
8. Memberikan perlindungan hukum bagi krama desa.
9. Mengikat persatuan dan kesatuan antara sesama krama banjar/desa dengan cara gotong-royong dalam bidang ekonomi, teknologi, kemasyarakatan dan keagamaan.
10. Menunjang dan mensukseskan program pemerintah dalam memajukan desa, pendidikan, dan perekonomian.

Dengan adanya manfaat yang diperoleh dari fungsi banjar adat tersebut apapun halangan dan rintangan, masyarakat Bali tetap mengelompokkan dirinya dalam banjar adat. Bila dikaji keberadaan banjar adat di daerah transmigrasi desa Jati Bali, maka muncul beberapa kondisi obyektif yang menghalangi terbentuknya banjar adat, yaitu;

1. Kondisi obyektif administratif pemerintahan. Sudah diketahui bahwa dengan berlakunya Undang Undang tentang Pemerintahan di Daerah di seluruh wilayah Indonesia, maka seluruh sistem administrasi pemerintahan di daerah cenderung bersifat seragam. Meskipun dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 menyebutkan "Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa". Pasal ini bila diberlakukan di Bali, sangat tepat. Banjar di Bali diakui keberadaannya sebagai daerah yang mempunyai hak asal yang bersifat istimewa. Sebelum pendatang transmigran dari Bali menempati desa Jati Bali, sistem pemerintahan

yang ada di Wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara. Sehingga pemerintahan yang ada tidak memakai sistem apa yang ada di Bali.

2. Komposisi penduduk dari sudut etnik, maka desa Jati Bali tidak homogen. Dengan berbagai latar belakang budaya etnik yang ada, maka tidak begitu mudah masyarakat Bali menampilkan identitas daerahnya di daerah transmigrasi. Seperti dalam bab sebelumnya, keberadaan masyarakat Bali pada awalnya selama tiga tahun hubungan mereka kurang begitu harmonis, karena adanya perbedaan agama dan cara hidup mereka. Masalah makanan babi adalah contoh yang tepat dalam hal ini. Pemandang masyarakat Bali memelihara ternak babi dan mengkonsumsinya, sedangkan warga Bugis, Jawa Barat dan Tolaki belum sepenuhnya menerima hal itu. Kondisi-kondisi obyektif tersebutlah yang mendorong masyarakat Bali berusaha menyesuaikan antara banjar adat dengan kondisi yang ada di daerah transmigrasi. Alasan itu pula yang membawa dampak perubahan pada banjar adat Bali di daerah transmigrasi dibanding dengan yang ada di Bali, asalnya.

4.1.1. Fungsi Mengatur Krama desa dengan Kahyangan

Kegiatan banjar adat mempunyai pola khusus yang selalu berorientasi untuk menjalankan organisasi banjar secara efisien dan efektif, untuk mencapai hasil-hasil yang maksimal. Kegiatan organisasi banjar ini memiliki dua aspek besar, yaitu: (1) kegiatan lahiriah, yaitu kegiatan yang terkait dengan lingkungan fisik atau material, dan (2) kegiatan rohaniah, yaitu kegiatan yang terkait dengan ritual-ritual budaya dan agama.

yang ada di Wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara. Sehingga pemerintahan yang ada tidak memakai sistem apa yang ada di Bali.

2. Komposisi penduduk dari sudut etnik, maka desa Jati Bali tidak homogen. Dengan berbagai latar belakang budaya etnik yang ada, maka tidak begitu mudah masyarakat Bali menampilkan identitas daerahnya di daerah transmigrasi. Seperti dalam bab sebelumnya, keberadaan masyarakat Bali pada awalnya selama tiga tahun hubungan mereka kurang begitu harmonis, karena adanya perbedaan agama dan cara hidup mereka. Masalah makanan babi adalah contoh yang tepat dalam hal ini. Pendatang masyarakat Bali memelihara ternak babi dan mengkonsumsinya, sedangkan warga Bugis, Jawa Barat dan Tolaki belum sepenuhnya menerima hal itu. Kondisi-kondisi obyektif tersebutlah yang mendorong masyarakat Bali berusaha menyesuaikan antara banjar adat dengan kondisi yang ada di daerah transmigrasi. Alasan itu pula yang membawa dampak perubahan pada banjar adat Bali di daerah transmigrasi dibanding dengan yang ada di Bali, asalnya.

4.1.1. Fungsi Mengatur Krama desa dengan Kahyangan

Kegiatan banjar adat mempunyai pola khusus yang selalu berorientasi untuk menjalankan organisasi banjar secara efisien dan efektif, untuk mencapai hasil-hasil yang maksimal. Kegiatan organisasi banjar ini memiliki dua aspek besar, yaitu: (1) kegiatan lahiriah, yaitu kegiatan yang terkait dengan lingkungan fisik atau material, dan (2) kegiatan rohaniah, yaitu kegiatan yang terkait dengan ritual-ritual budaya dan agama.

Dalam hal kerohanian atau sakral, banjar akan memerankan dimensi sakralnya dengan membantu satu sama lain dalam upacara keagamaan, seperti Manusia Yadnya, Pitra Yadnya, Bhuta Yadnya, dan Yadnya-Yadnya lainnya, ikut ambil bagian dalam perbaikan Kahyangan Tiga, dan ikut melaksanakan Piodalan di Kahyangan Tiga.

Kahyangan Tiga mempunyai posisi sentral dalam kehidupan banjar. Sebab ketiga kahyangan (pura) tersebut merupakan tempat suci mereka untuk melakukan pemujaan kepada Hyang Widhi. Setiap upacara keagamaan selalau dikoordinir oleh banjar yang menggunakan Kahyangan Tiga sebagai pusat aktivitasnya. Aspek keagamaan dan adat dalam banjar dapat menghidupkan sistem banjar secara keseluruhan, hal mana memperlihatkan keterkaitan antara kehidupan beragama para anggotanya pada sistem banjarnya sendiri. Di desa Jati Bali, Banjar Adat Dusun Satu (Sari Indah), Banjar Adat Dusun Dua (Nusa Indah), dan Banjar Adat Dusun Tiga (Mekar Indah) dijumpai kegiatan keagamaan dan adat di mana banjar berfungsi mengaktifkan para warganya dalam kegiatan tersebut.

Piodalan di pura dilaksanakan setiap 210 hari yaitu jatuh pada Purnama Kapat, dan Piodalan di bagi atas dua macam yang sering dilakukan oleh krama banjar yaitu piodalan kecil dan piodalan besar. Dalam kegiatan tersebut akan nampak fungsi banjar dalam mengatur krama banjar dengan Kahyangan Tiga, seperti yang diungkapkan oleh Ketua Adat Desa Jati Bali, I Made Dener (55 tahun):

"Pada kegiatan seperti ini biasanya dilakukan secara bergilir sebagai penanggung jawab, dan seluruh warga banjar yang mendapat bagian untuk bertanggung jawab, sedangkan anggota yang lainnya hanya datang untuk sembahyang dan membawa sesayut dengan pakaian yang bersih dan rapi. Sedangkan krama banjar yang mendapat tugas, menyiapkan segala sesuatu

Dalam hal kerohanian atau sakral, banjar akan memerankan dimensi sakralnya dengan membantu satu sama lain dalam upacara keagamaan, seperti Manusia Yadnya, Pitra Yadnya, Bhuta Yadnya, dan Yadnya-Yadnya lainnya, ikut ambil bagian dalam perbaikan Kahyangan Tiga, dan ikut melaksanakan Piodalan di Kahyangan Tiga.

Kahyangan Tiga mempunyai posisi sentral dalam kehidupan banjar. Sebab ketiga kahyangan (pura) tersebut merupakan tempat suci mereka untuk melakukan pemujaan kepada Hyang Widhi. Setiap upacara keagamaan selalau dikoordinir oleh banjar yang menggunakan Kahyangan Tiga sebagai pusat aktivitasnya. Aspek keagamaan dan adat dalam banjar dapat menghidupkan sistem banjar secara keseluruhan, hal mana memperlihatkan keterkaitan antara kehidupan beragama para anggotanya pada sistem banjarnya sendiri. Di desa Jati Bali, Banjar Adat Dusun Satu (Sari Indah), Banjar Adat Dusun Dua (Nusa Indah), dan Banjar Adat Dusun Tiga (Mekar Indah) dijumpai kegiatan keagamaan dan adat di mana banjar berfungsi mengaktifkan para warganya dalam kegiatan tersebut.

Piodalan di pura dilaksanakan setiap 210 hari yaitu jatuh pada Purnama Kapat, dan Piodalan di bagi atas dua macam yang sering dilakukan oleh krama banjar yaitu piodalan kecil dan piodalan besar. Dalam kegiatan tersebut akan nampak fungsi banjar dalam mengatur krama banjar dengan Kahyangan Tiga, seperti yang diungkapkan oleh Ketua Adat Desa Jati Bali, I Made Dener (55 tahun):

"Pada kegiatan seperti ini biasanya dilakukan secara bergilir sebagai penanggung jawab, dan seluruh warga banjar yang mendapat bagian untuk bertanggung jawab, sedangkan anggota yang lainnya hanya datang untuk sembahyang dan memabawa sesayut dengan pakaian yang bersih dan rapi. Sedangkan krama banjar yang mendapat tugas, menyiapkan segala sesuatu

keperluan yang berkaitan dengan acara piodalan tersebut, misalnya daun kelapa, kelapa, kayu bakar, daun dan sekaligus mengerjakan untuk sesajen dan perlengkapan lainnya. Singkatnya krama banjar melakukan persiapan upacara dari awal sampai akhir bahkan juga sampai pembersihan alat/peralatan ketika upacara sudah selesai dilakukan".

Dari informasi I Made Dener tersebut tergambar bahwa untuk menggunakan Pura dalam melakukan Piodalan, banjar telah mengatur siapa yang bertanggung jawab, siapa yang hanya datang dan sembahyang, dan siapa yang harus membersihkan. Dengan demikian hubungan krama banjar dengan Kahyangan Tiga tidak seenaknya saja, tanpa suatu aturan yang dapat dipakai bersama dan diterima semuanya.

Setiap krama banjar pada waktu ada Odalan di Kahyangan Tiga, masyarakat datang sendiri-sendiri bersama-sama keluarga ke Pura untuk melakukan persembahyangan umum yang dikoordinasikan ketua adat banjar. Apabila ada perkembangan yang mengharuskan suatu upacara dilakukan di tingkat banjar maka memperoleh petunjuk pelaksanaannya dari klihang banjar. Sebagai contoh adalah upacara Pecaruan Tawur Kesanga yang dilakukan setiap tahun sekali pada bulan Maret. Pada saat ini masyarakat datang ke Pura untuk melakukan upacara Pecaruan dengan membawa perani atau sesajen dalam rangkaian upacara tawur tersebut. Dalam hal ini tidak ada anggota yang dapat melakukan upacara sendiri, memang harus dilakukan di banjar (sesajen yang dikerjakan secara bersama) baru kemudian di pekarangan rumah masing-masing untuk diupacarakan. Sama seperti *odalan*, maka pada kesempatan ini tidak ada perbedaan status keanggotaan banjar dalam turun aktif melakukan kegiatan upacara ini.

Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa kedudukan banjar sangat penting dalam mengatur upacara yang dilakukan di pura. Kapan dan bagaimana penggunaannya akan ditentukan oleh banjar. Kondisi tersebut tidak jauh berbeda dengan di Bali. Apapun yang diambil oleh banjar merupakan perwujudan semangat kekeluargaan antar krama banjar dalam menggunakan tempat suci mereka Kahyangan Tiga sebagai milik bersama.

4.1.2. Fungsi Mengatur Pelaksanaan Panca Yadnya agama Hindu

Dalam Masyarakat yang beragama agama Hindu menuntut keselarasan hubungan manusia dengan Ida Sang Hyang Widhi Wase, dengan Atman Leluhur, Resi atau Guru, Manusia, dan Alam sekitar. Untuk mewujudkan hubungan dan komunikasi yang baik maka dilakukan persembahan atau korban suci (Yadnya) dan dihayati sebagai manifestasi konkrit agama. Di desa Jati Bali Yadnya dikoordinir langsung oleh banjar atau desa adat, dan semua anggota banjar yang beragama Hindu ikut aktif dalam melaksanakan persiapan upacara yang diadakan sampai pembuatan banten atau sesajen. Hal tersebut dilakukan secara gotong royong (Hasil wawancara dengan I Made dener, selaku ketua adat desa Jati Bali tanggal 15 April 2000).

Menurut I Gusti Ngurah Bagus dalam tulisannya "**Kebudayaan Bali**" terdapat lima upacara yang biasa disebut Panca Yadnya, yaitu:(1) Dewa Yadnya, yang terutama berkenaan dengan upacara-upacara kuil-kuil umum dan keluarga;(2) Manusia Yadnya, yang terutama meliputi upacara-upacara siklus hidup dari masa kanak-kanak sampai dewasa; (3) Pitra Yadnya, yang merupakan upacara-upacara yang ditujukan kepada roh-roh leluhur dan yang meliputi upacara-upacara kematian

sampai pada upacara penyucian roh leluhur; (4) Resi Yadnya, yang merupakan upacara-upacara yang berkenaan dengan pentasbihan pendeta (mediksa); (5) Bhuta Yadnya, yang merupakan upacara ditujukan kepada kala dan bhuta yaitu roh-roh yang dapat mengganggu. Pelaksanaan Yadnya yang besar krama banjar yang satu membutuhkan krama banjar lainnya. Oleh karena itu peranan banjar dalam mengkoordinir Yadnya tersebut sangat penting artinya.

Pelaksanaan Manusia Yadnya di desa Jati Bali adalah sebagai berikut; upacara-upacara megedong-gedongan yaitu upacara yang dilakukan pada bayi dalam kandungan, upacara bayi pada saat lahir, Upacara Ketus yaitu yang dilakukan apabila pusar bayi sudah dilepas yang tujuannya untuk kebersihan, Upacara Nyambutin (umur bayi sudah tiga bulan yang biasa disebut dengan Nelubulanin), Upacara otonan (enam bulan Bali) yaitu untuk memperingati hari ulang tahunnya, Upacara potong gigi (Mapanes) yaitu upacara untuk mengurangi sad ripu, karena di dalam tubuh kita atau diri kita terdapat sad ripu (enam musuh) yang ada pada diri manusia, salah satu diantaranya dengan cara melakukan yadnya yaitu potong gigi (mepanes) dan ini tidak sampai mengganggu email gigi atau kesehatan. Upacara Mawinten yaitu upacara untuk memohon waranugraha akan mempelajari ilmu pengetahuan seperti kesusilaan, keagamaan, dan lainnya, dan yang terakhir adalah upacara perkawinan.

Sedangkan upacara yang berkaitan dengan Dewa yadnya adalah sebagai berikut; Upacara Hari Kliwon, Purnama, Tilem, Buda Kliwon Pagerwesi, Tumpek Landep, Penampahan Galungan, Hari Raya Galungan, Hari Raya Kuningan, Tumpek Penguduh, Hari Raya Saraswati, Hari Raya Nyepi (tahun baru caka) dan lain-lain. Upacara yang berkaitan dengan Pitra Yadnya adalah upacara yang meliputi Sawe

Wedana, Ngeseng Sawe secara langsung dengan upacara, Asti Wedana, ngeseng yang dibakar kembali dari bangbang, digeseng dengan segala upacaranya; Swasata, upacara atiwi-atiwi terhadap mayat yang tidak mungkin dijumpai lagi, sehingga mayat diwujudkan dengan badan-badan lain, antara lain ilalang, air dan lain-lainnya.

Dan yang terahir adalah Bhuta Yadnya adalah sebagai berikut; Mecaru Kesanga yaitu upacara yang dilakukan pada waktu menyambut tahun baru caka, tumpek uye (tumpek kandang), tumpek penguduh (tumpek bubuh wariga pengatang) dan lain-lainnya.

Pelaksanaan upacara-upacara tersebut sangat sesuai dengan ajaran agama Hindu dan sangat sinkron dengan tuntutan adat istiadat yang berlaku maka krama banjar secara langsung telah melaksanakan ketiga kerangka (Tattwa, Susila, dan Upacara) dari ajaran agama Hindu. Setelah menyadari filsafatnya (tatwa), yaitu pengertian kepada isi ajaran agama dan sistem tindakan mereka sebagai orang beriman (beretika/bersusila), maka ditingkatkan akhirnya mereka melaksanakan upacara. Dengan dilaksanakannya ketiga kerangka agama tersebut maka individu sebagai krama banjar telah dibawa ke arah kehidupan yang harmonis, serasi, dan seimbang dalam hubungannya krama banjar dengan alam lingkungannya dan dengan Tuhannya. Dalam hal Yadnya, banjar akan membantu krama banjar untuk saling menolong dalam upacara keagamaan.

Sebagai salah satu contoh peranan banjar di desa Jati Bali dalam pelaksanaan Yadnya adalah adanya lembaga Paruman, atau sebagai lembaga musyawarah yang terdiri dari pengurus banjar untuk menjalankan tugas-tugas banjar. Paruman banjar diketuai oleh seorang ketua dan pengurus lainnya dan dengan seluruh anggota banjar.

Salah satu fungsi dari lembaga ini ialah mencari kesepakatan-kesepakatan atau mencari kebijakan-kebijakan yang terbaik dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh anggota Banjar. Misalnya dalam Piodalan di Pura yang memerlukan dana/biaya sebesar kurang lebih Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dihitung oleh pengurus sebelum piadolan. Kebutuhan biaya Piadolan inilah kemudian yang menjadi topik pembahas dalam lembaga Paruman banjar, apakah biaya Piadolan itu akan dibayar dengan uang ataukah setiap anggota banjar mengeluarkan material-material yang diperlukan untuk Piadolan ataukah setiap krama banjar mengeluarkan uang. Lembaga Paruman ini haruslah menentukan kebijakan tertentu dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi banjar.

4.1.3 Mengatur Hubungan Antar Sesama Krama Banjar

Dalam banjar dan masyarakat pada umumnya akan ditemukan beberapa persolan menyangkut hubungan antar anggota masyarakat atau krama banjar. Dalam hal ini yang paling menonjol adalah yang menyangkut hubungan kekerabatan. Sistem masyarakat Bali adalah patrilineal, artinya garis keturunan dalam sistem kekerabatan di tangan laki-laki. Oleh sebab itu kedudukan laki-laki dianggap lebih tinggi daripada perempuan. Ada keyakinan dalam masyarakat Bali bahwa laki-laki adalah keturunan Purusa, suatu hakekat yang permanen yang diberikan oleh Tuhan, dan perempuan dianggap keturunan Predana, suatu hakekat yang bersifat berubah, yang memang diberikan oleh Tuhan. Perempuan dianggap sebagai sesuatu yang berubah dan sifatnya tidak abadi. Konsep ini digunakan oleh masyarakat untuk memberikan tugas kepada laki-laki untuk melestarikan kebudayaan Bali dan agama Hindu.

Dalam hukum adat waris dijumpai laki-laki menerima warisan material dan non-material dari keluarga, namun perempuan tidak memperoleh warisan dari keluarga. Kendatipun suatu keluarga mempunyai banyak tanah dan materi, keluarga tersebut tidak akan memberikan warisan kepada perempuan. Dari sistem pewarisan yang mengabdikan kepada laki-laki telah menciptakan nilai bahwa "anak laki-laki lebih berharga atau lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan anak perempuan". Sistem patrilineal ini di Jati Bali belum banyak berubah manakala istri itu keturunan etnik Bali asli, dan mereka tetap menokohkan laki-laki sebagai orang yang lebih mempunyai kekuasaan dalam kekerabatan.

Sistem kekerabatan masyarakat Jati Bali juga pada Dadia, seperti di Bali, di mana organisasi kekerabatan itu terdiri dari beberapa keluarga atau rumah tangga. Setiap dadia mempunyai tempat sembahyang yang cukup lengkap yang disebutnya **Sanggah** atau **Merajan Kawitan**. Satu kekerabatan ini dapat mencapai puluhan dan bahkan ratusan keluarga, sehingga satu kekerabatan mempunyai ratusan/ribuan orang. Namun demikian karena kondisi di daerah transmigrasi keluarga di pisah-pisah maka jumlah dadia sedikit sekali anggotanya.

Suatu kekerabatan dianggap sebagai suatu keluarga besar atau **Nyame Gde**, oleh sebab itu keluarga besar ini akan diatur dalam organisasi kekerabatan. Organisasi kekerabatan ini memiliki tiga unsur penting, yaitu; (1) **Pemangku Dadia**; yaitu pemimpin yang ditunjuk sebagai ketua kekerabatan; (2) **Paruman Dadia**; yaitu sekelompok orang yang dianggap telah senior dan arif dalam kebudayaan dan agama; (3) **Pada Krama Dadia**, yaitu perorangan atau anggota dari seluruh kekerabatan.

Apabila suatu kekerabatan menghadapi masalah, maka pengurus kekerabatan itu akan mengadakan paruman, atau rapat adat. Dalam rapat adat itu akan dibahas tentang masalah yang dihadapi, dan menentukan jalam keluar yang terbaik. Di samping itu seluruh anggotanya dikontrol oleh awig-awig yang berlaku. Paruman itulah yang akan mengontrol hubungan kekerabatan dalam masyarakat, apakah hubungan-hubungan itu berjalan baik ataukah belum. Jika anggota lupa melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan kemudian Pemangku dadia akan memberi peringatan.

Demikian juga bilamana ada anggota yang mulai lupa melaksanakan kegiatan adat dan agama, seperti membawa sesajen ke Pura Dadia, maka pemangku dadia akan mencari anggota untuk diberi suatu pengertian. Walaupun warga masyarakat keturunan etnik Bali berada di Sulawesi Tenggara khususnya desa Jati Bali atuaraturan dalam kekerabatan tetap dilaksanakan, seperti adanya pengumpulan dana untuk merawat tempat sembahyang.

Sebagian besar warga masyarakat keturunan Bali di Sulawesi Tenggara merasa tetap terikat dengan "ikatan kekerabatan". Dalam berhubungan krama banjar dengan lainnya tentu akan mengalami perbedaan dan ketegangan. Dalam hal ini fungsi banjar sangat penting. Berbicara ketegangan-ketegangan maka prosesnya dapat dikelompokkan pada tiga sifat yaitu; (1) Ketegangan sosial antar adat istiadat dan kebutuhan individu; (2) Ketegangan sosial antar kelompok atau golongan khusus yang bertemu dalam perbedaan kepentingan; (3) Ketegangan sosial yang terjadi karena adanya kaum penyimpang atau orang-orang yang sengaja menyimpang dari kepentingan masyarakat.

Adanya ketegangan tersebut peranan para "pra-juru-pra-juru" banjar dan "sesepuh" banjar memberikan pengarahan kepada warganya guna meyakinkan dan memulihkan kepercayaan warga banjar yang menyimpang tadi pada suatu pengertian akan kebaiakan adat istiadat dan keputusan (pararem) yang telah disepakati bersama. Apakah itu dalam bentuk peraturan-peraturan (awig-awig) yang tidak tertulis.

Di dalam mempertebal keyakinan warga banjar akan suatu norma yang harus berlaku atau akan kebaiakan dari adat istiadat yang dapat mengatur hubungan antar krama dilaksanakan melalui media pendidikan. Hal itu dapat dilihat dari adanya organisasi kepemudaan yang disebut dengan Seka taruna-taruni (pemuda-pemudi). Wadah ini mempersiapkan pemuda-pemudi sebelum menjadi anggota banjar, untuk mengetahui adat istiadat banjanya serta norma-norma yang ada dengan cara belajar. Belajar di sini telah dengan aktif mengikutsertakan diri dalam berbagai kegiatan banjar, misalnya kesenian, kegiatan gotong royong, serta aktifitas-aktifitas lainnya, atau "ngayahin" (menggantikan kedudukan orang tua) jika berhalangan hadir, sehingga nantinya setelah menjadi dewasa atau terjun menjadi anggota banjar memiliki suatu keyakinan bahwa adat istiadat yang ada memiliki nilai yang positif.

Petatah petitih merupakan sarana ampuh untuk mendidik warga banjar dalam melaksanakan aturan, norma atau nilai-nilai yang ada. adapun pepatah petitih yang bersifat mendidik para warga banjar untuk mengintrospeksi diri sebelum bertindak atau mengajukan kritik pada orang lain, semua warga banjar seperti; "nyikut baju di awak" (mengukur baju di badan sendiri). Buka "padine ana payung nyeleg", "ane misi nguntul" (seperti buah padi, yang kosong tegak, yang berisi menunduk). Perumpamaan ini bermaksud menyadarkan para warga banjar supaya menjunjung

tinggi dan menilai tinggi sifat-sifat kemanusiaan yang rendah hati dan tidak sombong antara satu dengan lainnya. Demikian juga usaha dalam meyakinkan warga banjar tentang suatu aturan atau adat yang harus dilaksanakan para sesepuh, pra juru dengan cara memberi contoh konkrit.

Rapat-rapat (sangkepan) banjar dilaksanak secara periodik oleh banjar-banjar di desa Jati Bali yang merupakan suatu sarana propaganda. Melalui media sangkepan dipakai untuk menyampaikan usul dan pendapat krama banjar kepada klihang banjar. Bagi seroang klihang banjar dipakai untuk bertukar informasi. Dan terjadilah sangkepan sebagai sarana berdiskusi antar krama banjar dan dengan klihang banjar. Selain itu pula dilakukan paruman banjar yang juga dapat berfungsi sebagai lembaga yang memberikan nasehat atau masukan kepada klihang banjar tentang hal-hal yang perlu diambil dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh organisasi banjar.

Dalam pengamatan peneliti lembaga ini sangat berperan memberikan makna sosial kontrol yang mengatur hubungan kepentingan antar krama banjar dalam kehidupan di masyarakat. Salah seorang informan, yakni Drs. I Nyoman Nirtha umur 65 tahun menegaskan dengan ungkapan;

"Di dalam paruman krama banjar biasanya sering terjadi pertentangan dan salah persepsi atau krama banjar kurang paham dengan apa yang dibicarakan karena maklum krama banjar sudah lanjut usia dan terlalu banyak pekerjaan yang mereka hadapi baik di sawah maupun pekerjaan di kebun belum lagi kebutuhan anak-anak mereka yang sudah sekolah sampai ke perguruan tinggi, sehingga paruman biasanya alot, tetapi krama banjar puas karena pengurus bijak dan sabar untuk menjelaskan kepada krama banjar yang belum puas".

Hal senada diungkapkan oleh Bapak I Gede Derta, umur 58 tahun, selaku Bendahara banjar adat desa Jati Bali:

"Lembaga paruman ini sangat bermanfaat bagi krama banjar karena semua unek-unek krama banjar dapat dilampiaskan dalam paruman ini, sehingga segala sesuatu apapun yang akan dikerjakan oleh pengurus harus melalui paruman dulu atau minta pendapat/restu (persetujuan) krama banjar dulu, barulah pengurus berbuat atau bertindak mengerjakannya. Walaupun di dalam paruman terjadi pertentangan pendapat, yang penting krama banjar mengetahui dulu permasalahannya".

Dari dua pendapat tersebut menunjukkan bahwa adanya lembaga-lembaga musyawarah dalam banjar sangat mampu mengatur dan mengendalikan hubungan antar krama banjar, sehingga dapat mencegah terjadi pertentangan dan konflik yang tak dapat diselesaikan.

4.1.4. Fungsi Menetapkan Sanksi-Sanksi Bagi Pelanggaran Terhadap Hukum-Adat

Organisasi banjar selalu menghendaki seluruh anggotanya untuk berperan secara maksimal, sehingga mekanisme organisasi dapat berjalan secara maksimal, dan seluruh anggota memperoleh keuntungan yang maksimal dalam masyarakat. Oleh sebab itu seluruh anggota menyadari bahwa keterlibatan dalam organisasi bukan hanya memberikan keuntungan pada dirinya melainkan juga keuntungan bagi seluruh banjar.

Peraturan-peraturan banjar dilaksanakan secara konsisten dan sama untuk semua anggota untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Oleh sebab itu para anggota merasa enggan dan malu jika tidak terlibat secara menyeluruh dalam kegiatan banjar. Tingkat keterlibatan dalam banjar dapat dikatakan sebagian besar anggota mengikuti semua kegiatan banjar. Jika tidak aktif mereka akan dikucilkan

oleh krama banjar lainnya. Mereka yang tidak aktif dipermalukan di muka umum, karena diumumkan secara langsung oleh ketua organisasi.

Di samping itu peneliti juga menemui bahwa keterlibatan anggota banjar dalam kegiatan organisasi merupakan suatu "*normative behavior*", dalam arti perilaku bermakna normatif, jika tidak dilakukan secara tulus dan ikhlas akan mendatangkan ganjaran yang buruk. Oleh sebab itu keaktifan dalam organisasi bukan saja bermakna rasional, namun juga bermakna non-rasional, atau suatu kewajiban moral religius yang harus dipatuhi.

Bila dijumpai sementara anggota banjar tidak hadir dalam suatu kegiatan formal yang ditentukan oleh organisasi, maka anggota itu akan diberi teguran-teguran oleh ketua sub-wilayah atau langsung oleh ketua organisasi banjar. Jika teguran-teguran yang diberikan tidak diperhatikan, maka organisasi kemudian menjatuhkan sanksi dalam rapat pleno banjar.

Dalam pengamatan peneliti di lapangan, anggota banjar belum ada yang menyatakan siap didenda sebagai sanksi dan akan dibayar sebagaimana mestinya. Mereka umumnya tidak ingin organisasi menjatuhkan sanksi, sebab itu akan mendatangkan nilai malu dalam masyarakat atau dalam organisasi. Malu sebenarnya jauh lebih berharga dibandingkan materi, sebab bilamana diberikan sanksi maka citra pribadi akan menjadi tidak baik.

Bagi masyarakat tradisional yang masih memiliki basis moralitas yang kokoh akan sangat memperhatikan sanksi-sanksi yang dapat memberikan wujud di muka umum. Oleh sebab itulah mereka selalu berusaha sekali untuk menghindari sanksi yang diberikan organisasi. Dengan kata lain, melalui sanksi, banjar telah melakukan

sosial kontrol terhadap anggotanya. Kontrol sosial haruslah dibedakan dari pengendalian diri, walaupun keduanya berhubungan erat. Pada taraf individual, maka pengendalian sosial lebih mengarah pada usaha mempengaruhi pihak lain, sedangkan pengendalian diri lebih tertuju pada pribadi sesuai dengan ide atau tujuan tertentu yang ditetapkan sebelumnya. Kontrol sosial terjadi apabila suatu kelompok menentukan perilaku kelompok lain, atau suatu kelompok mengendalikan perilaku anggotanya dan pribadi-pribadi mempengaruhi tanggapan dari pihak lain (Soekanto, 1987:207).

Dari pendapat tersebut di atas maka sosial kontrol atau pengendalian sosial berproses pada tiga tahap; yaitu kelompok terhadap kelompok, kelompok terhadap anggotanya serta pribadi terhadap pribadi lainnya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sosial kontrol terjadi apabila seseorang harus berbuat atau tidak, sesuai dengan keinginan pihak lain, sesuai dengan keinginannya sendiri atau tidak sesuai dengan kepentingannya.

Sedangkan tujuan sosial kontrol atau pengendalian sosial adalah agar terjadi konformitas dan kesinambungan dalam suatu kelompok atau masyarakat tertentu. Jadi pengendalian sosial tertentu bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat.

Dari sudut sifatnya dapatlah dikatakan bahwa pengendalian sosial dapat bersifat preventif, yaitu merupakan suatu usaha pencegahan terhadap keserasian antara kepastian dan keadilan. Dapat juga bersifat represif yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan tersebut. Usaha preventif seperti pendidikan formal dan informal, usaha represif seperti penjatuhan

sanksi terhadap warga masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap kaidah yang berlaku (awig-awig). Bentuk-bentuk sanksi yang diberlakukan di desa Jati Bali berupa penghambatan surat-surat dari kelian dinas, dan dan sanksi yang paling parah adalah dikucilkan oleh anggota krama banjar sebagai akibatnya apabila yang bersangkutan mendapat musibah kematian misalnya, maka krama banjar akan jarang menjenguknya atau melayatnya. Dan hal ini belum terjadi di Jati Bali.

Selain rasa malu, juga dikembangkan melalui banjar rasa taku. Pengembangan rasa takut yang hidup dalam komunitas banjar melalui sanksi-sanksi yang berat. Pelanggaran dengan sanksi yang lebih berat adalah "puikin" banjar atau "sepekin" banjar (dimusuhi banjar), pelanggaran yang lebih berat bobohnya sehingga krama banjar yang bersangkutan tidak diajak bicara oleh segenap warga banjar.

Perbuatan melawan kehendak orang banyak dengan sejenis sanksi yang dijatuhkan sebenarnya tidak berakhir demikian saja, karena ada suatu kepercayaan bahwa orang yang mendapat hukuman seperti itu dikemudian hari, keturunannya masih akan menanggung akibat sanksi tersebut. Misalnya kesalahan "mecoran" banjar (suatu peristiwa mengangkat sumpah dihadapan segenap anggota banjar). Kesalahan ini benar-benar sudah merupakan perbuatan yang bernai dan bertentangan dengan sistem nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat. Di sinilah peranan banjar menunjukkan kesakralannya. Pelaksanaan sanksi tersebut diumumkan di depan para anggota banjar. Dengan cara seperti itu maka sekaligus warga banjar sudah dapat mengetahui ikut serta dalam pelaksanaan sanksi tersebut.

Banjar-banjar yang ada di desa jati Bali menerapkan sistem pemberian imbalan untuk kontrol sosial. Imbalan ini berbentuk konkrit sehingga krama banjar

akan bertindak sesuai dengan awig-awig yang ada di lingkungan banjar. Imbalan ini dapat berupa barang-barang, uang, makanan. Pemberian makanan pada waktu pesta kepada krama yang bekerja lebih berat, yaitu bekerja mempersiapkan makanan untuk keperluan yang berkaitan dengan Yadnya, seperti upacara Manusia Yadnya (perkawinan) yang diserahkan kepada banjar (meserah ke banjar). Maka para klihang dan kesinoman mendapat semacam "labe", tanah lebih, yaitu pembagian yang lebih banyak dari krama lainnya.

Dengan adanya laba ini maka para kelian ataupun krama banjar diikat pada suatu pelaksanaan tugas tertentu atau pada suatu aturan tertentu atau yang diberikan baik karena tugasnya ataupun karena aturannya sendiri yang menentukan demikian. Pemberian imbalan yang bertujuan sebagai cara pengendalian sosial yang lain adalah pemberian suatu kedudukan atau penghargaan yang tinggi kepada krama banjar di desa Jati Bali yang berhasil melaksanakan suatu aturan yang berlaku di lingkungan banjarnya. Imbalan tersebut berupa penghargaan mendudukkan krama tersebut sebagai pimpinan atau kelian dalam struktur banjarnya. Atau dalam suatu kewajiban untuk menangani pekerjaan yang menjadi kewajiban seluruh krama banjar seperti kedudukan dalam panitia penggalan dana untuk perbaikan balai banjar. Seseorang yang bertugas seperti itu sudah merasakan betapa beratnya tugas yang harus dikerjakan, tetapi karena tugas itu akan menjadi seorang pimpinan bagi seluruh banjar, maka kedudukannya itu sebagai motivator pribadi untuk bertindak lebih baik dan sesuai dengan norma atau nilai yang berlaku. Tugas seperti itu menjadi idaman setiap orang untuk melaksanakannya.

Di desa jati Bali pada komunitas banjar ada suatu kepercayaan yang bernama "**Karma Pala**" (buah dari perbuatan) merupakan suatu sistem kepercayaan yang ternyata mempunyai efektifitas yang cukup tinggi sebagai sistem pengendalian sosial. Dalam kepercayaan ini setiap krama banjar percaya bahwa buah dari perbuatan jahat adalah kemelaratan dan buah dari perbuatan baik adalah kebahagiaan. Suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kebiasaan yang berlaku di lingkungan akan menghasilkan "**pengucilan**" atau pengasingan dari krama banjar yang bersangkutan (sanksi sosial).

Di dalam "**medana punia**" sebagai suatu perbuatan memberikan bantuan kepada sesama krama banjar yang lazim dilaksanakan oleh banjar-banjar di desa Jati Bali sebagai hakikat hubungan antar sesama manusia, mempunyai pengertian yang mendalam tentang imbalan itu sendiri. Karena dengan tindakan itu krama banjar percaya bahwa imbalan yang didapat dari perbuatannya sendiri itu akan teraskan dalam hidupnya yaitu berupa bantuan pada sesama krama sesuai dengan aturan (awig-awig) dan norma-norma yang berlaku. Di samping itu perbuatan atau aktifitas dalam upacara-upacara "**Bhuta Yadnya**" yaitu yang rutin dilaksanakan pada *tileming sasih kesanga* oleh kram abanjar sebagai suatu korban suci.

4.1.5. Mengurusi Barang-barang Milik Desa Adat (Banjar) Serta Tempat Suci (Kahyangan Tiga)

Untuk mengurus dan memelihara barang-barang milik banjar adat, maka dalam masyarakat Bali mengambil aturan yang bersumber pada ajaran agama Hindu. Dalam sistem kepercayaan agama Hindu ada suatu hal yang diyakini bahwa tempat

atau benda dan peralatan suci atau *tenget (angker)* harus mendapat perlakuan khusus. Demikian juga pengertian perbuatan yang menurut ajaran agama tidak boleh dilakukan, dan bila dilanggar akan mendapat sejumlah sanksi atau hukuman. Adanya pengertian akan kepercayaan ini akan menumbuhkan kebersamaan dalam mengurus benda-benda adat dan tempat suci.

Perbuatan yang dilarang untuk dilakukan sehubungan dengan adanya kepercayaan ajaran agama tersebut tentang tempat atau benda suci dan angker, tentunya perlakuan yang sewenang-wenang terhadap aparat atau pra-juru banjar seperti *langgia, degag, tulah, tempal*, misalnya mencaci maki pra-juru (misuh klihang, misuh banjar) dapat digolongkan kepada perbuatan yang melanggar ajaran agama dan karena itu hukumannya adalah hukuman yang bersifat bathiniah dengan sanksi mewajibkan si pelanggar melaksanakan upacara guna mengembalikan kesucian lembaga adat banjar tersebut, yaitu dengan "*Prayascita*" dan "*Melukat*".

4.1.6 Perlindungan Hukum, Menjaga Ketertiban, Keamanan, dan Kedamaian Dalam Masyarakat.

Ketertiban, keamanan, dan kedamaian masyarakat akan terwujud jika tercipta hukum yang baik. Oleh karena itu perlindungan hukum kepada anggota banjar sangat penting. Perlindungan tersebut harus benar-benar di atur dalam awig-awig dan secara konkrit dilaksanakan dalam masyarakat. Masyarakat dalam mematuhi hukum tidak lepas dari kondisinya masing-masing. Ada yang taat karena dorongan bathiniah religius dan ada pula yang berdasarkan pertimbangan rasional akan akibat dari suatu pelanggaran terhadap hukum.

Masyarakat di desa Jati Bali ketaatan warga banjar terhadap aturan yang ada baik berupa awig-awig dan peraturan-peraturan pemerintah (pesuara-pesuara) bukanlah atas dasar paksaan, tetapi lahir dari kesadaran hati nurani, serta krama banjar menyadari arti dan nilai dari aturan, guna mencapai kehidupan yang tertib, aman, dan damai.

Kebutuhan akan aturan tidak saja mengacu kepada produk aturan kelompok, tetapi juga mengacu pada sistem hukum nasional. Dengan tujuan agar muncul kesadaran akan hukum yang berlaku di Indonesia.

Masyarakat Bali telah menunjukkan sikap dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban daerahnya melalui sistem banjar, yang nampak dalam isyarat tertentu atau bunyi *kukul* (kentongan) yang bertalu-talu terhadap Panca Baye (bahaya) seperti kebakaran, banjir, pencurian, orang ngamuk, dan lain-lain. Dengan kata lain, dalam banjar telah ada sistem keamanan swakarsa.

Suara *kukul* merupakan isyarat dalam masyarakat Bali yang merupakan kekhasan dalam kaitannya dengan bahaya yang menimpa dari salah satu krama dapat didengar melalui nada pukulannya. Salah satu awig-awig banjar desa Jati Bali disebutkan:

"Tatengeran keni kebencana baya mekadi kalebu bang (geni baya) suara kukul bulus ngelantur.

Tatengeran yening wenten wong ngamuk, tabuh/suaran kukul bulus mapalet-palet (ping tiga-ping tiga)

Tetengeran yening kemalingan (harta baya) suaran kukul bulus mapalet-mapalet-paletan (ping kalih-ping kalih)

Tatengeran yening wenten belabur ageng, wong kepelegandang, wong ican sang kening kalebu ring sagara, ring tukad, suaran kukul bulus".

Artinya:

"Ciri suara kenthongan jik ada warga banjar yang ketimpa musibah kebakaran rumah, maka suara kenthongan bertalu-talu berkelanjutan.

Ciri suara kenthongan jika ada orang mengamuk, maka suara kenthongan bertalu-talu silih berganti tiga kali-tiga kali.

Ciri suara kenthongan jika ada warga yang kecurian maka suara kenthongan bertalu-talu berganti-ganti dua kali-dua kali.

Ciri suara kenthongan jika ada banjir besar, warga banjar yang diperkosa, warga yang hilang tenggelam di laut, sungai suara kenthongan bertalu-talu".

Jika ciri suara kenthongan tersebut memberi isyarat panca bahaya, maka seluruh krama banjar diharuskan keluar dengan membawa peralatan sesuai dengan bhaya (musibah) yang terjadi. Mengingat desa Jati Bali ialah desa yang pertama kali menjadi daerah transmigrasi di propinsi Sulawesi Tenggara, maka segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pemerintah setempat akan datang ke desa Jati Bali untuk mendapat data-data akan memperoleh gangguan. Untuk mengatasi hal ini tiap-tiap banjar di desa Jati Bali membentuk pos keamanan lingkungan. Yang menjadi lazim disebut Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling). Sistem ini merupakan sistem keamanan swakarsa di kalangan krama banjar. Di mana tiap malam krama banjar mendapat giliran untuk meronda, guna menjaga keamanan lingkungan banjarnya.

Demikian halnya dalam kejadian pencurian atau warga yang mendapat kecelakaan, maka warga banjar lainnya segera memeberi pertolongan dengan disertai suatu isyarat tanda tertentu (sawen) terhadap posisi kejadian (apakah dengan batu kapur atau batu merah sebagai pengembangan peralatan pertolongan mara bhaya tradisional) sehingga korban dapat dengan segera di bawa ke rumah sakit tanpa menunggu kedatangan petugas atau polisi.

4.1.7. Mensukseskan Program Pemerintah

Banjar adalah suatu organisasi sosial yang khas di Bali dengan tujuan tertentu. Dari sekian banjar yang ada di Sulawesi tenggara pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dengan ada yang di Bali. Bahkan banjar-banjar yang ada di desa Jati Bali dituntut fleksibilitasnya dalam menghadapi masalah kependudukan. Tetapi tujuan prinsipil sekali adalah menjaga keutuhan eksistensi manusia sebagai warga masyarakat banjar sehingga fungsi-fungsi biologi, sosial, politik, ekonomi, agama merupakan fungsi-fungsi kodrati manusia dapat berjalan dengan baik. Fleksibilitas banjar terhadap tuntutan dari pemerintah untuk mensukseskan program juga dipandang sebagai bagian pelaksanaan fungsi banjar itu sendiri.

Adapun program-program yang berkaitan erat dengan program pemerintah yang dilaksanakan oleh banjar adalah; bidang politik, ekonomi, kependudukan, pendidikan dalam lain-lain. Fungsi banjar-banjar di desa Jati Bali dalam bidang politik dapat dilihat pada keikutsertaan krama banjar di dalam pembangunan baik fisik maupun non fisik. Banjar difungsikan sebagai tempat pemungutan suara (TPS) yang dilakukan setiap pemilu. Ini besar sekali peranannya di dalam mensukseskan pesta demokrasi sebagai pengejawantahan kehidupan politik warga banjar.

Banjar juga mempunyai fungsi administrasi. Hal itu nampak dalam kejelasan status keanggotaan dalam banjar tersebut yang mencakup beberapa aspek; pencatatan penduduk, aturan keanggotaan, pelaksanaan tugas dan kewajiban serta aspek pelayanan administrasi oleh perangkat banjar kepada para anggotanya. Hal ini dibuktikan melalui Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki serta kartu keluarganya. Dari ketiga banjar yang ada kewajiban dan tanggung jawab bervariasi. KTP sangat penting artinya sebab bukti itu menjadi dasar keanggotaan banjar.

Dalam pelayanan administrasi yang diperoleh setiap anggota banjar dilayani oleh perangkat banjar, antara lain; pembuatan surat keterangan, kartu tanda penduduk, penunjukan dan pengumuman penting lainnya dari pemerintah. Untuk tugas-tugas yang berhubungan dengan kegiatan desa dinas biasanya ditentukan oleh kliehang banjar. Pendaftaran penduduk dan anggota yang *ngarep* juga merupakan bagian dari fungsi administrasi ini yang dilakukan oleh kliehang banjar atau kepala dusun. Bahkan belakangan ini pengumuman penting yang ada hubungannya dengan masalah pembangunan seperti KB, UPGK, kejar Paket A, kebersiahn lingkungan serta pungutan lainnya dilakukan oleh kliehang banjar. Dalam pelaksanaannya sering terjadi tumpang tindih antara tugas desa dinas da banjar. Namun demikian dapat diatasi dengan baik, melalui kerjasama dan saling pengertian. Dari struktur desa dinas dan desa adat (banjar) tidak ada hubungan struktural, namun secara fungsional hal itu terjalin erat. Untuk tugas-tugas formal, dilakukan oleh desa dinas. Dan banjar menopang struktur tersebut sebagai penyambung antara warga dan pemerintah.

Selain itu dalam bidang kependudukan, banjar sangat efektif dalam mensukseskan program Keluarga Berencana (KB), Usaha Peningkatan Gizi Keluarga (UPGK). Dengan memanfaatkan rapat-rapat atau (*sankep*) banjar dalam memperkenalkan cara-cara atau sistem penundaan usia kawin dan menjarangkan kelahiran demi kesehatan ibu dan anak. Dalam hal ini si pembawa pesan memanfaatkan rapat-rapat banjar yang diadakan secara periodik atau khusus dalam suatu pertemuan yang diadakan untuk keperluan tersebut. Pertemuan itu dihadiri oleh ibu-ibu saja sebagai sasaran atau bersama-sama dengan kepala keluarga atau bapak. Sedangkan pertemuan banjar dalam arti sebenarnya dihadiri oleh para keluarga atau

laki-laki yang berhubungan dengan tugas-tugas sebagai anggota banjar. Karena itu sebagai pengertian sistem yang menyangkut keseluruhan dalam banjar, maka konsep keluarga berencana (KB) sistem banjar tidak menyangkut banjar dalam pengertian adat atau lembaga secara utuh. Di samping hal tersebut juga termasuk dalam penimbangan balita dan pengenalan program gizi keluarga masih dilakukan di Balai banjar sebagai bagian dari kegiatan ibu-ibu yang bergabung dalam Pendidikan Kesejahteraan keluarga (PKK).

Kliahng banjar yang ada di desa Jati Bali memanfaatkan dengan baik lembaga banjarnya untuk menyampaikan peranan pembangunan ini. Perogram Keluarga Berencana (KB) yang rutin dilakukan tiap bulan sedangkan kegiatan penimbangan balita dilakukan tiap bulan pula. Seorang ibu mengatakan:

"Dengan adanya program pemerintah seperti penimbangan balita, kegiatan PKK, di tingkat banjar atau desa saya merasa senang karena di desa sendiri tidak perlu lagi mengeluarkan biaya transportasi, dan saya bisa sekaligus memasak cepat dan cepat mengantar nasi untuk ke sawah dan mencari bahan pakan ternak babi".

Demikian juga organisasi yang ada di banjar dapat dipakai sebagai media komunikasi dan dapat dipakai sebagai media penyampaian pembaharuan, yaitu organisasi pemuda (Karang Taruna, Truna Truni) yang pada mulanya merupakan kelompok pemuda banjar yang mensosialisasikan diri mereka dalam tugas-tugas banjar, kemudian keanggotaan oraganisasi ini diperluas dengan anggota wanita dengan fungsi yang lebih luas pula sehingga dari seke taruna menjadi seke truna truni. Karang taruna sebagai wujud kebiatan pemuda muncul lebih baru adalah program dari pemerintah khususnya Departemen Sosial yang mengaktifkan pemuda di lingkungannya. Beberapa banjar dituntut untuk berpartisipasi dengan membentuk

Karang Tarunan, meskipun di banjar sudah ada lembaga itu. Seperti diungkapkan oleh Bapak Kepala Desa Jati Bali, yakni I Wayan Cangker, 35 tahun;

"Dengan adanya organisasi banjar ataupun organisasi kepemudaan, yang berada di desa Jati Bali sangat membantu sekali mengkomunikasikan program-program pemerintah untuk dapat dilaksanakan demikian juga dengan adanya organisasi kepemudaan ini juga dapat membawa nama baik desa sampai ke tingkat nasional pada tahun-tahun lalu, karena mereka dapat mempertahankan persatuan dan kesatuan dari desanya".

Menyimak penjelasan Bapak Kepala Desa tersebut di atas bahwa begitu besarnya fungsi banjar dalam mensukseskan program-program pemerintah.

Dalam bidang kesenian dan kebudayaan banjar juga mensukseskan pelestarian budaya daerah. Kita ketahui bahwa masyarakat Bali di desa Jati Bali adalah pendatang dengan kebudayaan sendiri. Melalui banjarnya mereka mampu mempertahankan kebudayaannya sendiri. Hal itu nampak dalam upacara Panca Yadnya yang di dalamnya terkandung usaha pelestarian kesenian dan budaya leluhur, yaitu; (1) Adanya bangunan pelinggih berupa merajan banjar yang indah dengan aturan yang tersurat dalam asta Kosala dan asta Bumi (Aturan pembuatan bangunan); (2) seni karawitan (gamelan) yang mengiringi jalannya upacara (yadnya); (3) Seni suara dalam bentuk persantian dan kekidungan, di mana semua ini diperuntukkan mengiringi yadnya; (4) Seni tari baik yang sakral untuk mengiringi upacara tertentu yang biasa disebut Tari Wali, ataupun tari yang sifatnya bebalian (profan) untuk menghibur masyarakat.

Kegiatan seni budaya dalam rangkaian upacara keagamaan yang dikelola dan dipertahankan oleh banjar merupakan bukti nyata akan peranan penting banjar dalam mempertahankan dan menjaga kelestarian budaya bangsa. Pemerintah dengan

demikian tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya dalam memajukan seni dan budaya daerah yang ada.

4.1.8. Meningkatkan Persatuan dan Kesataun Antara Krama Banjar Melalui Kegiatan Sosial Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, fungsi banjar diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi para kramanya yang diatur melalui organisasi sosial banjar serta segala sesuatu pemenuhan hidup diabsatraksikan dapat dicapai dengan bantuan banjar. Pengertian fungsi ekonomi banjar-banjar di desa Jati Bali menunjukkan ciri-ciri yang bervariasi.

Setiap banjar-banjar di desa Jati Bali memiliki sumber dana bermacam-macam untuk menutupi kekurangan dana. Dari sekian banyak banjar yang ada di Jati Bali, mempunyai fungsi sebagai berikut; (1) sebagai sumber keuangan banjar, akibatnya iuran para anggota banjar bisa diperkecil guna menutupi pengeluaran banjar; (2) meringankan beban orang tua yang anaknya disekolahkan di SD melalui BP3. Sehingga disepakati tidak terlalu besar untuk membayar uang BP3; (3) ikut dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa yang lebih menekankan fungsi sosial bidang pendidikan. Beberapa banjar yang ada di Jati Bali seperti banjar adat dusun satu (Nusa Indah) menggali dana melalui cara arisan selesai panen dikumpulkan padi sesuai kesepakatan dan kebutuhan dari banjar yang bersangkutan, selanjutnya dijual oleh anggota banjar dan uangnya dimasukkan dalam kas banjar.

Sebagai suatu organisasi yang bersifat tradisional yang terutama banjar-banjar yang ada di desa Jati Bali, sebagian besar ciri tradisionalnya masih melekat. Ini terlihat dari seka atau perkumpulan yang ada dalam banjar tersebut, walaupun tidak

seutuh seka-seka pada jaman dulu. Eksistensi seka ini kalau berfungsi sebagaimana mestinya juga mengarah kepada perekonomian banjar, misalnya seka gong apakah gong itu gong gede atukah beleganjuran, bagi warga yang membutuhkan gamelan utamanya dalam kepentingan Panca Yadnya, warga akan menyewa gamelan sebagai pelengkap melalui seka sebagai pemain instrumennya. Hasilnya dibagi dua; setengah milik banjar dan setengahnya seka. Dari sekian usaha-usaha yang dilaksanakan banjar dalam bidang ekonomi secara implisit akan meringankan beban para krama anggotanya, serta memberikan kemudahan-kemudahan dengan fasilitas yang ada. Dengan demikian fungsi di bidang ekonomi ini juga diperlihatkan melalui banjar.

4.2. Perubahan Struktur Banjar Adat Yang Ada Di Desa Jati Bali

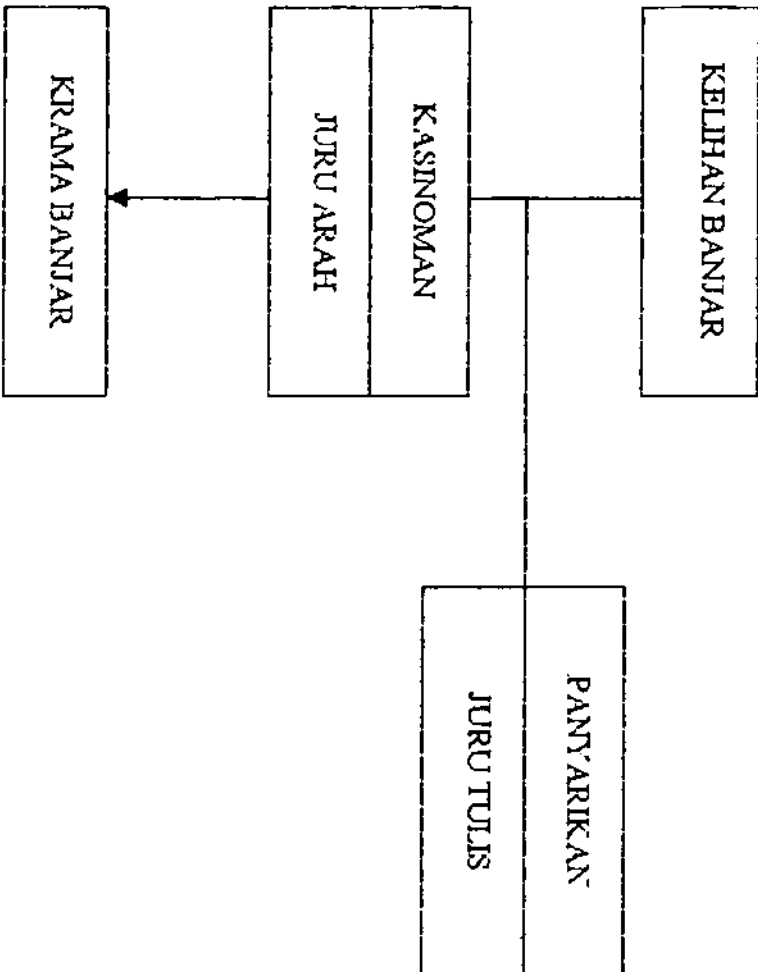
Desa Jati Bali adalah merupakan daerah transmigrasi yang dikenal dengan adanya dua variasi struktur. Variasi struktur ini muncul karena adanya perbedaan dalam faktor historis (gelombang pengaruh lingkungan) dan struktur sosial. Berdasarkan dua indikator di atas, desa Jati Bali dibedakan atas dua tipe (1) Desa Dinas yang secara struktural pemerintahan mempunyai hubungan vertikal ke atas dengan Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan Pemerintah Pusat. Juga mempunyai hubungan vertikal ke bawah, yaitu kepada banjar-banjar (dusun-dusun) adat untuk selanjutnya sampai kepada masyarakat desa; (2) desa adat atau banjar adat yang dikepalai oleh Ketua Adat.

Bila disimpulkan adanya perubahan struktur banjar adat di desa Jati Bali dengan yang ada di Bali, meskipun hal itu hanya sebagian. Perubahan-perubahan itu nampak pada hal-hal berikut, yaitu:

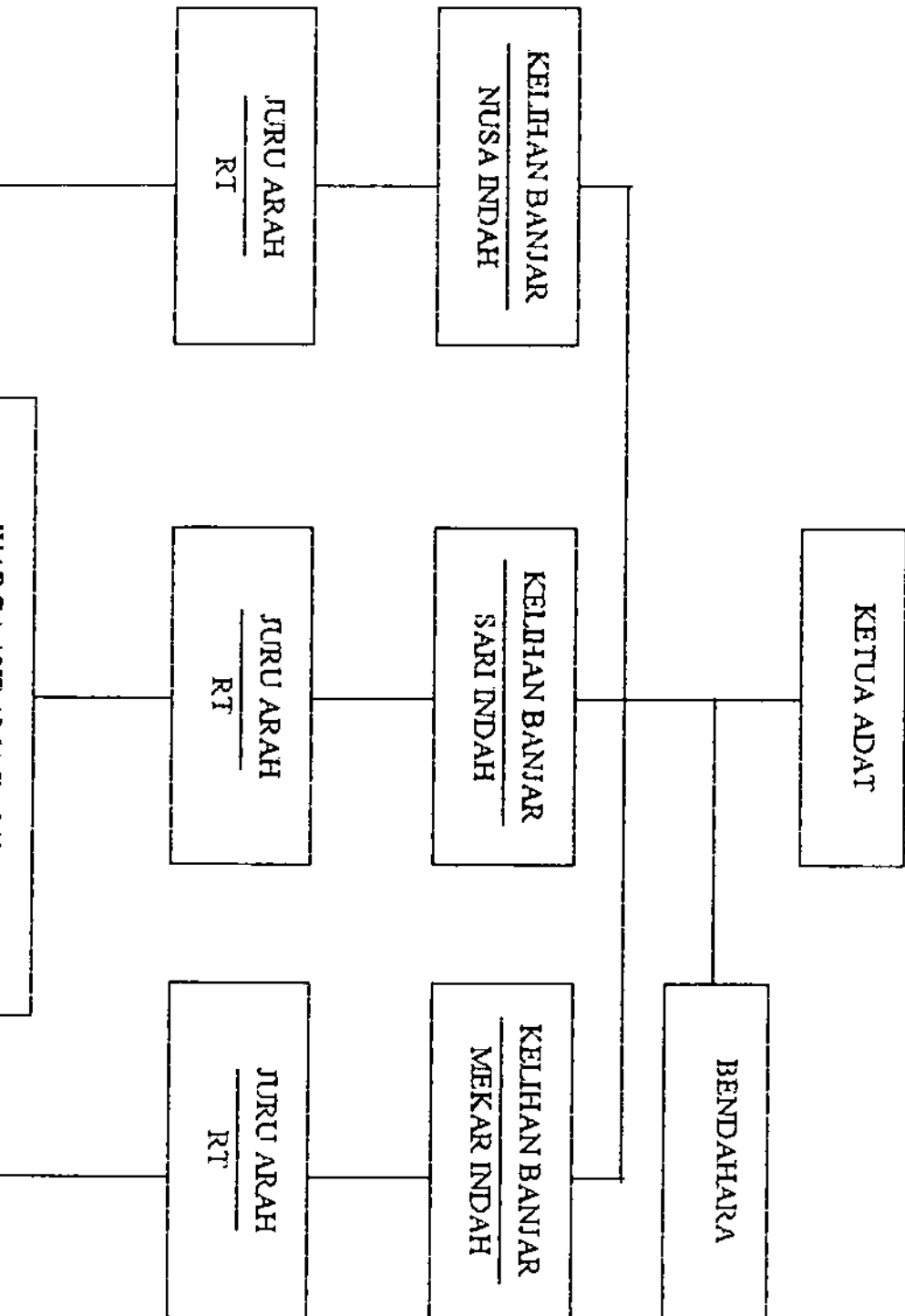
1. Ketua adat tidak secara otomatis mempunyai kedudukan yang sama dengan Kepala Desa dalam hal kewenangan pemerintahan. Hal itu berakibat bahwa kepala desa tetap sebagai kepala wilayah yang sah secara politik dan administratif. Bila di Bali dapat terjadi klihang Banjar (ketua banjar) membawahi/meliputi beberapa desa dinas, namun di Jati Bali, sebaliknya Kepala Desa (dinas) yang meliputi banjar adat.
2. Penggunaan istilah banjar yang ada hanya dipakai oleh masyarakat Bali, sedangkan yang lain tidak. Oleh karena itu banjar di desa Jati Bali menyesuaikan pembagian wilayah yang ada. Dusun yang merupakan pembagian wilayah di bawah desa, bagi orang Bali digunakan sebagai pengelompokan masyarakat dan dijadikan banjar. Sehingga apa yang disebut banjar adat adalah dusun, sub-bagian dari desa (dinas). Jika di Bali Banjar lebih identik dengan desa (karena luas wilayahnya), maka di Jati Bali, itu tidak ditemui. Bila di Bali banjar besar mempunyai tempek-tempek, kedudukan ini di desa Jati Bali tidak ada, namun hanya juru arah yang dijabat oleh RT setempat.
3. Ada beberapa komponen dalam struktur banjar adat yang kalau di Bali ada, sedangkan di Jati Bali tidak muncul. Sebagai contoh; jika di Bali ada Panyarikan dalam banjar, maka dalam banjar-banjar di desa Jati Bali tidak ada. Sebab Panyarikan Bandesa dijabat oleh klihang banjar sendiri.

Untuk melihat perbedaan tersebut dapat dilihat dalam bagan 3 dan 4 tentang Struktur Banjar di Bali dan desa jati Bali.

BAGAN 3
STRUKTUR BANJAR DI BALI
(KECIL)

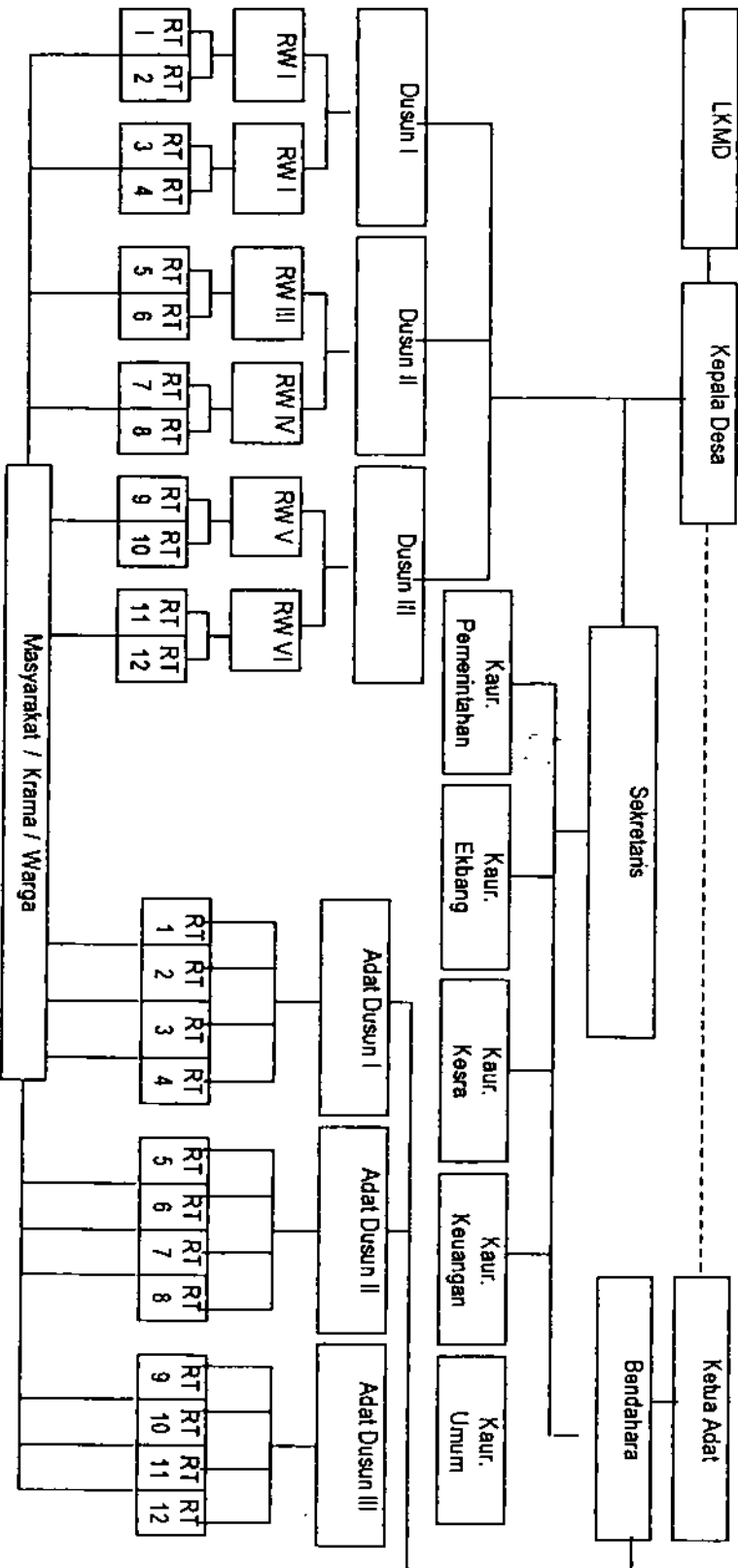


BAGAN 4
STRUKTUR ORGANISASI BANJAR
DI DESA JATI BALI



STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA JATI BALI

Bagan 1



Keterangan :

— = Gans Komando

- - - = Gans Kerjasama

4.3. Pelaksanaan Awig-Awig di Desa Jati Bali

Awig-awig yang ada di desa Jati Bali nampaknya merupakan bawaan dari daerah asal Bali. Namun, demikian pelaksanaannya tidak persis apa yang ada di Bali. Awig-awig yang berlaku di desa Jati Bali pun diambil dari ajaran agama Hindu dan adat istiadat yang bersumber dari karya sastra kuno. Seperti sudah tercantum dalam penjelasan di bab sebelumnya dan pelaksanaan pemberian sanksi, di desa Jati Bali mengambil contoh awig-awig dari Denpasar sebagai awig-awig. Mengapa demikian, sebab pada prinsipnya sama saja antara awig-awig yang satu daerah dengan yang lain.

Dalam menerapkan awig-awig tersebut juga demikian, mengandalkan sanksi moral dan sosial dari banjar. Di desa Jati Bali awig-awig sangat ditaati oleh krama banjar. Keberadaan mereka sebagai perantau dan pendatang menumbuhkan kesadaran mereka untuk berbuat baik dan berusaha sekuat mungkin mempertahankan adat Bali yang sudah menjadi bagian hidupnya. Oleh karena itu meskipun di rantau mereka tetap mengusahakan bahwa daerahnya adalah “**Real Bali**” juga seperti apa yang ada di Bali.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian berjudul “Komunitas Tradisional di Daerah Transmigrasi” merupakan suatu studi tentang eksistensi Banjar Adat Bali di daerah transmigrasi yang juga daerah yang bukan aslinya banjar adat berada. Sudah diketahui umum, bahwa banjar adat sebagai suatu kelompok sosial hanya ada di Bali, namun demikian di daerah lain yang masyarakatnya berasal dari Bali ternyata juga membentuk kelompok sosial tradisional banjar adat tersebut. Salah satu kasus yang dikaji dalam penelitian ini adalah keberadaan banjar adat di daerah transmigrasi desa Jati Bali Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara.

Persoalan yang paling pokok dikaji adalah eksistensi banjar adat tersebut di desa Jati Bali, dan persoalan fungsi banjar adat di daerah transmigrasi. Persoalan kedua diajukan mengingat bahwa berdasarkan studi Izikowitz dan Barth tentang suku Pakhun dan Thai, ciri atau identitas sebuah kelompok sosial akan dipertahankan di daerah bukan asalnya kalau itu mudah ditampilkan dan mempunyai nilai guna. Banjar adat di desa Jati Bali, sebagai identitas dan ciri khas masyarakat Bali demikian juga keberadaannya tentu akan tidak sama persis dengan apa yang ada di Bali.

Berdasarkan hasil studi lapangan yang dilakukan, maka penelitian ini mempunyai kesimpulan sebagai berikut:

1. Keberadaan (eksistensi) *banjar adat* yang ada di desa Jati Bali merupakan kesatuan masyarakat yang bersifat sosio-religius. Konsepsi tiga unsur pokok dalam banjar tetap dipenuhi, yaitu; wilayah, anggota, dan *Kahyangan* desa.

Namun demikian pura yang ada ternyata tidak hanya pura utama, melainkan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jumlah pura yang ada tidak hanya tiga Pura Utama (Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem), namun demikian, ada beberapa pura yang dibentuk oleh kelompok-kelompok tertentu yang berasal dari daerah tertentu, misalnya; transmigran asal Negara (Jembrana) membuat Pura Antjak Geni, Pura Taman Sari dibuat oleh kelompok asal Tabanan, dan lainnya. Munculnya pura-pura kelompok tersebut menunjukkan adanya ikatan dengan tanah leluhur masing-masing. Eksistensi banjar juga dipertahankan mengingat manfaat dan arti banjar bagi masyarakat Bali di daerah transmigrasi.

2. *Banjar adat* di desa Jati Bali tetap dipertahankan (eksis) oleh masyarakat Bali di desa Jati Bali lebih disebabkan oleh faktor internal, yaitu, *pertama*, kebutuhan bersama akan wadah yang bersifat sosio-religius, di mana dengan wadah tersebut mereka dapat melaksanakan kegiatan keagamaan (*Yadnya*). *Kedua*, keyakinan keagamaan di mana secara tradisi, masyarakat Bali akan terikat dalam suatu tempat yang dibatasi oleh *Kahyangan Tiga*. *Ketiga*, banjar adat selama ini dirasakan mempunyai manfaat bagi masyarakat lainnya. Dan mampu berfungsi menciptakan kestabilan masyarakat desa Jati Bali secara keseluruhan (fungsional). Dengan kata lain, secara internal bermanfaat, secara eksternal menjadi bagian dari masyarakat setempat.
3. Hubungan antara desa (dinas) dan *banjar adat* sangat tegas, di mana desa mengurus pemerintahan secara umum, sedangkan banjar adat hanya mengurus persoalan warga yang menyangkut dengan masalah-masalah keagamaan dan kegiatan bersama dalam banjar. Atau dengan kata lain hubungannya bersifat

- konsultatif, di mana banjar adat hanya membantu, sedangkan otonomi pemerintahan ada di tangan desa (dinas).
4. Struktur banjar adat di desa Jati Bali pada prinsipnya sama dengan yang ada di Bali, namun ada beberapa perubahan/perbedaan yang terjadi. Kedudukan *Bandesa*/ Kepala Desa tidak secara otomatis diduduki oleh ketua adat, mengingat penduduk desa Jati Bali tidak semua kelompok masyarakat Bali. Pembagian wilayah banjar juga berbeda, di mana tidak ada *tempek-tempek* (sub-bagian dari banjar, namun hanya sebatas *juruh arah*/ RT). Demikian juga halnya, luas wilayah banjar mengikuti pembagian wilayah yang ada, yaitu mengikuti pembagian dusun. Yang disebut banjar wilayahnya adalah dusun, sedangkan *juruh arah* adalah RT.
 5. *Awig-awig* yang ada dalam banjar, merupakan adopsi dari *awig-awig* yang ada di daerah asal (Bali) seperti nampak dalam awig-awig hubungan antar *krama* banjar. Hal itu dapat dimengerti, karena di manapun banjar adalah kesatuan religius, di mana sumber aturan kelompok (organisasi) diambil dan didasarkan pada ajaran agama Hindu. Oleh karena itu *awig-awig* yang ada merupakan upaya pelestarian nilai dan norma agama serta adat dalam masyarakat Bali yang ada di daerah transmigrasi.
 6. Fungsi-fungsi banjar yang ada di desa Jati Bali pada intinya masih seperti banjar-banjar yang ada di daerah asal (Bali), namun demikian telah mengalami penyesuaian. Hal tersebut, nampak pada pengaturan tanah kuburan. Masalah tanah di daerah transmigrasi, tidak mutlak milik banjar, tetapi milik desa, oleh karena itu banjar hanya mengurus sebagian tanah yang memang sudah diberi oleh

desa untuk kuburan masyarakat Bali. Secara umum fungsi banjar adat di desa jati Bali adalah sangat penting dan multi-peran, baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, keamanan, politik dan pendidikan.

7. Perubahan yang terjadi dalam *banjar adat* di desa Jati Bali pada intinya hanya pada tingkat organisasi sosial; yakni struktur *banjar adat*. Perubahan ini disebabkan oleh peraturan perundangan yang berlaku, komposisi penduduk yang majemuk, dan kondisi sosial-budaya masyarakat setempat yang hanya menerima *banjar adat* berlaku untuk tiga dusun.

5.2. Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini merupakan bukti yang memperkuat pendapat dari teori fungsional. Seperti dikatakan pada bab awal bahwa eksistensi sebuah bagian masyarakat karena bagian tersebut fungsional; artinya menunjang kesatuan secara keseluruhan. *Banjar adat* di desa Jati Bali merupakan kesatuan sosial yang didasarkan tidak hanya oleh wilayah, tetapi juga religi. Dengan adanya banjar adat di desa Jati Bali, maka lembaga keagamaan, dan lembaga kemasyarakatan dapat berfungsi secara baik. Bisa saja terjadi, tanpa *banjar adat* masyarakat Bali di daerah transmigrasi tidak begitu kuat dalam melaksanakan upacara keagamaan. Akan lebih baik dan khidmat bila dijalankan secara bersama, dalam suatu wadah banjar adat. Demikian juga, banjar adat dapat melakukan pengawasan terhadap perilaku anggotanya.

Bukti lain, bahwa banjar adat tersebut fungsional adalah tumbuhnya solidaritas mekanik (menurut Durkheim) dalam kegiatan gotong royong; baik

masalah pembangunan, keagamaan, sosial, dan ekonomi; karena adanya ikatan akan nilai-nilai dan kepercayaan agama Hindhu. Lain dari pada itu, banjar adat berperan dalam suksesnya pembangunan di desa Jati Bali; misalnya melalui program Keluarga Berencana; artinya secara keseluruhan (masyarakat desa Jati Bali) *banjar adat* ikut menentukan jalannya fungsi-fungsi bagian lain dalam masyarakat. Dengan demikian jelas, bahwa secara teoritis *banjar adat* di desa Jati Bali fungsional dalam masyarakat.

Banjar adat sebagai bentuk ikatan sosial (komunitas tradisional) khas Bali, ternyata keberadaannya di daerah transmigrasi (bukan Bali) mengalami perubahan. Sesuai dengan teori Leuer, perubahan yang terjadi pada *banjar adat* di desa Jati Bali adalah perubahan pada tingkat organisasi. Perubahan struktur tersebut merupakan modifikasi terhadap struktur masyarakat setempat (sesuai undang-undang tentang Pemerintahan Desa). *Banjar adat* yang ada di desa Jati Bali merupakan bukan bagian di luar desa Jati Bali, namun bagian kesatuan dari desa Jati Bali.

Akibat dari penemuan ini, hendaknya keberadaan *banjar adat* di daerah transmigrasi tetap dipertahankan dan dikembangkan fungsinya dalam masyarakat. Selain itu, dapat menjadi dorongan bagi masyarakat Bali di perantauan untuk tetap mempertahankan *banjar adat* sebagai kesatuan sosial religius mereka. Untuk melakukan itu, perubahan-perubahan tidak dapat dihindari termasuk modifikasi struktur ke dalam struktur masyarakat setempat di mana masyarakat Bali hidup.

5.3. Implikasi Praktis

Banjar adat merupakan ikatan sosial dalam masyarakat Bali yang didasarkan atas wilayah dan religi. Sebagai sebuah organisasi sosial banjar adat mempunyai fungsi penting dalam kehidupan sosial ekonomi maupun keagamaan. Dengan *banjar adat* masyarakat Bali dapat melakukan kegiatan gotong royong dalam kehidupan keseharian, dan dapat melaksanakan kehidupan keagamaan dengan baik.

Keberadaan *banjar adat* di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, dapat menjadi potensi konflik antar etnis. Oleh karena itu, perlu diwaspadai potensi tersebut. Anggota (*krama*) *banjar adat* harus dapat melakukan modifikasi-modifikasi atau penyesuaian perilaku yang adaptif dengan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian eksistensinya akan bertahan lama dan bermanfaat bagi seluruh golongan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

-,1989. *Awig-awig Banjar Gelogor Desa Adat Denpasar.*
- Astika,Ketut Sudhana ,dkk., 1986. *Peranan Banjar Pada Masyarakat Bali*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.
- Beunet, John W. , 1976. *The Ecological Transition Cultural Anthropoligy and Human Adaptation*, New york: Peggamon PressInc
- Dherana,S.H. Tjok Raka, 1974. *Pembinaan Awig-Awig Desa Dalam Tertib Masyarakat*, Fakultas Hukum Dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana.
- Faisal, Sanafiah, 1990. *Metode Penelitian Kualitatif* , Malang : YA3.
- Geertz, Hildred, 1981. *Aneka Budaya Dan Komonikasi Indonesia*, Jakarta: Yayasan Ilmu Sosial FIS UI , h. V.
- Hasan Shadily, 1958. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, P.T. Pembangunan.
- Johnson, Doyle Paul, 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Diterjemahkan Robert M.Z. Lawang, Jakarta: PT. Gremedia.
- Johnson, Doyle Paul, 1994. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta: PT. Gremedia Pustaka Utama, 177-178.
- Kaler, I Gusti Ketut, 1986. *Butir-Butir Tercecer Tentang Adat Bali* , Bali Agung Denpasar.
- Kartodijo, Sartona, dkk, 1975. *Sejarah Nasional Indonesia II*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kkusuma , Sri Ananda ; *Kamus Bahasa Bali*, CV Kayumas Denpasar.
- Koentjaraningrat, 1977 a. *Metode Wawancara dalam Koentjaraningrat (Ed). Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Hal. 162 - 196, Jakarta: PT. Gramedia.
-,1977b. *Beberapa Dalam Antropologi*, Jakarta: Penerbit Aksara Baru.
-,1979. *Pengantar Ilmu Antropologi* Jakarta : Aksara Baru .

-, 1985. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta Aksara Baru.
-, 1986. *Aspek Manusia Dalam Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia.media .
-, 1990. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta: Dian Rakyat.
-, 1993. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* Jakarta: Djambatan.
- Lauer, Robert H., 1993. *Persepektif Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J., 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung : CV Remaja Karya.
- Mordiwarsito L. , 1979. *Kamus Jawa Kuno-Indonesia*, Ende Flores: Nusa Indah Percetakan amolog.
- Parisada Hindu Dharma Indonesia, 1968. *Upadeca, Tentang Ajaran-ajaran agama Hindu*, Denpasar: PHDI Bali.
- Partiana ,I Wayan, 1984. Dalam Kumpulan Tulisan “ *Kepribadian dan Perubahannya Beberapa Perubahan Dan Pergeseran Nilai-Nilai Sosial Budaya Dalam Masyarakat Bali*, Jakarta: Gremedia.
- Pitana I Gde., 1995. (Ed)..., *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*, Denpasar: Penerbit Bali Post.
- Pitana, I Gde., 1994. Editor, *Dinamika Masyarakat Dan Kebudayaan Bali* (sebuah Antologi), Penerbit Balai Pustaka,
- Poerwadarminta , 1979. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* , Jakarta : Balai Putaka,
- Purwita, Ida Bagus Putu., 1984. *Desa Adat Dan Banjar Di Bali*, Denpasar : Percetakan Kawisastra.
- Sanderson, Stephen K., 1993. *Sosiologi Makro*, Jakarta: Rajawali Pres.
- Santika, Wayan Koti, 1985. *Peranan Lembaga Adat Dalam menunjang Stabilita Sosial Di Bali*, Dalam Majalah Kerta Patrika No. 33 Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar.
- Soekanto, Soerjono, 1983. *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, Jakarta : CV Rajawali.

- Soekanto, Soerjono, 1987. *Sosiologi Suatu Pengantar* , Jakarta : Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono, 1997. *Sosiologi Suatu Pengantar* , Jakarta: Raja Grafindo Persada,.
- Spradley, James P. 1979. *The Ethnographic Interview*, New York : Holt, Rinehart and winston.
- Swastawa Darmayudha , 1992. *Perkawinan Berbeda Wangsa*, Denpasar : Bali Post Edisi 30, Bulan Desember.
- Syani Abdul, 1995. *Sosiologi Dan Perubahan Masyarakat* , Jakarta: Pustaka Jaya.
- Yudha, Ida bagus Gde, 1994. *Pergeseran dalam Pelaksanaan Agama; Menuju Tarwa* Denpasar.

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : I Wayan Cangker
 Umur : 35 tahun
 Pendidikan : STM
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Agama : Hindu
 Pekerjaan : Kepala desa Jati Bali
 Alamat : Desa Jati Bali

2. Nama : I Gede Derta
 Umur : 58 tahun
 Pendidikan : SGB
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Agama : Hindu
 Pekerjaan : Kepala Sekolah Dasar /Bendahara LKMD Desa Jati Bali
 Alamat : Desa Jati Bali

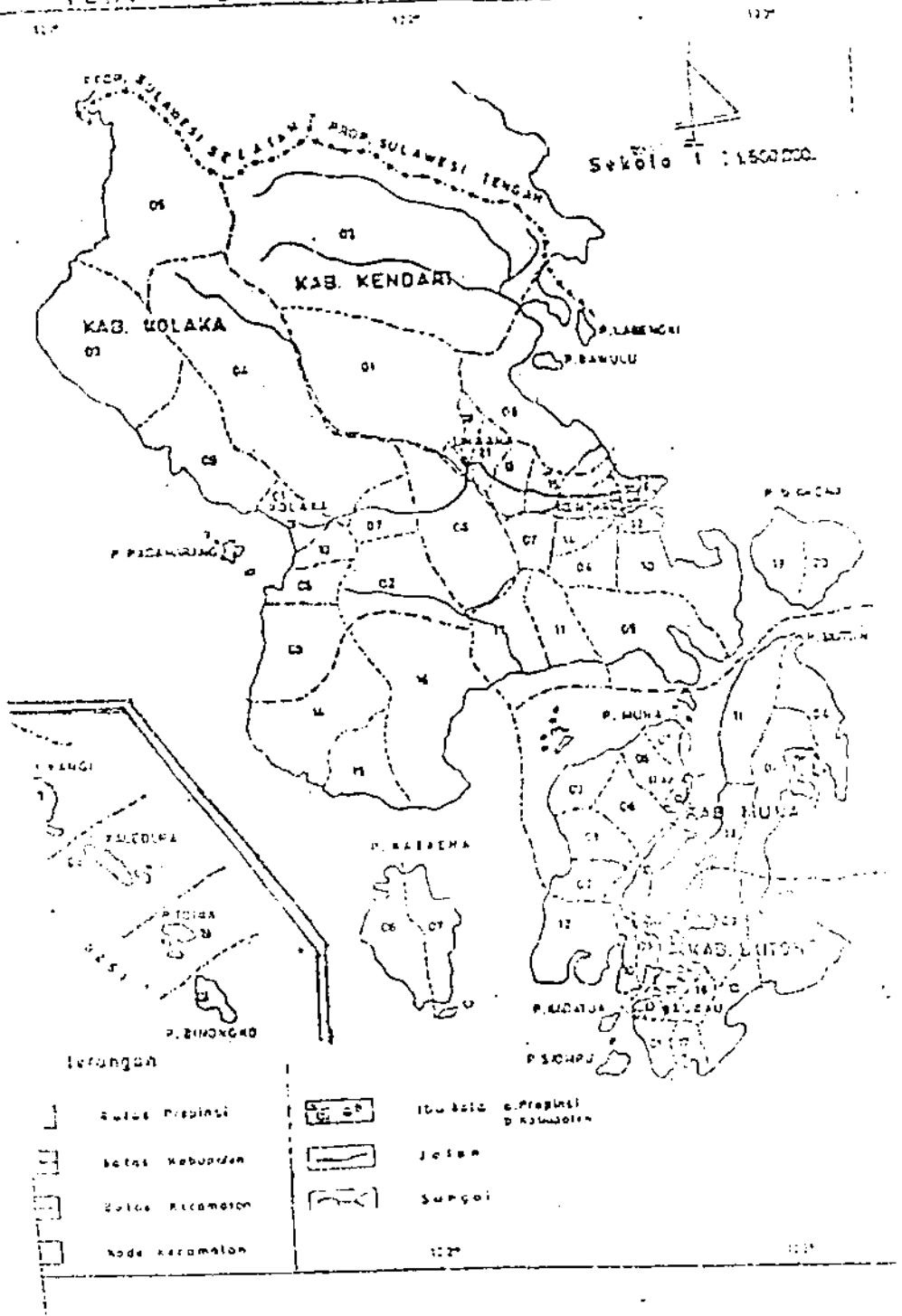
3. Nama : I Made Dener
 Umur : 55 tahun
 Pendidikan : SLTP
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Agama : Hindu
 Pekerjaan : PNS Depdikbud Kecamatan
 Alamat : Desa Jati Bali

4. Nama : Drs. I Nyoman Nirtha
 Umur : 65 tahun
 Pendidikan : SGB
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Agama : Hindu
 Pekerjaan : Mantan Kepala SD/Mantan Ketua LKMD.
 Alamat : Desa Jati Bali

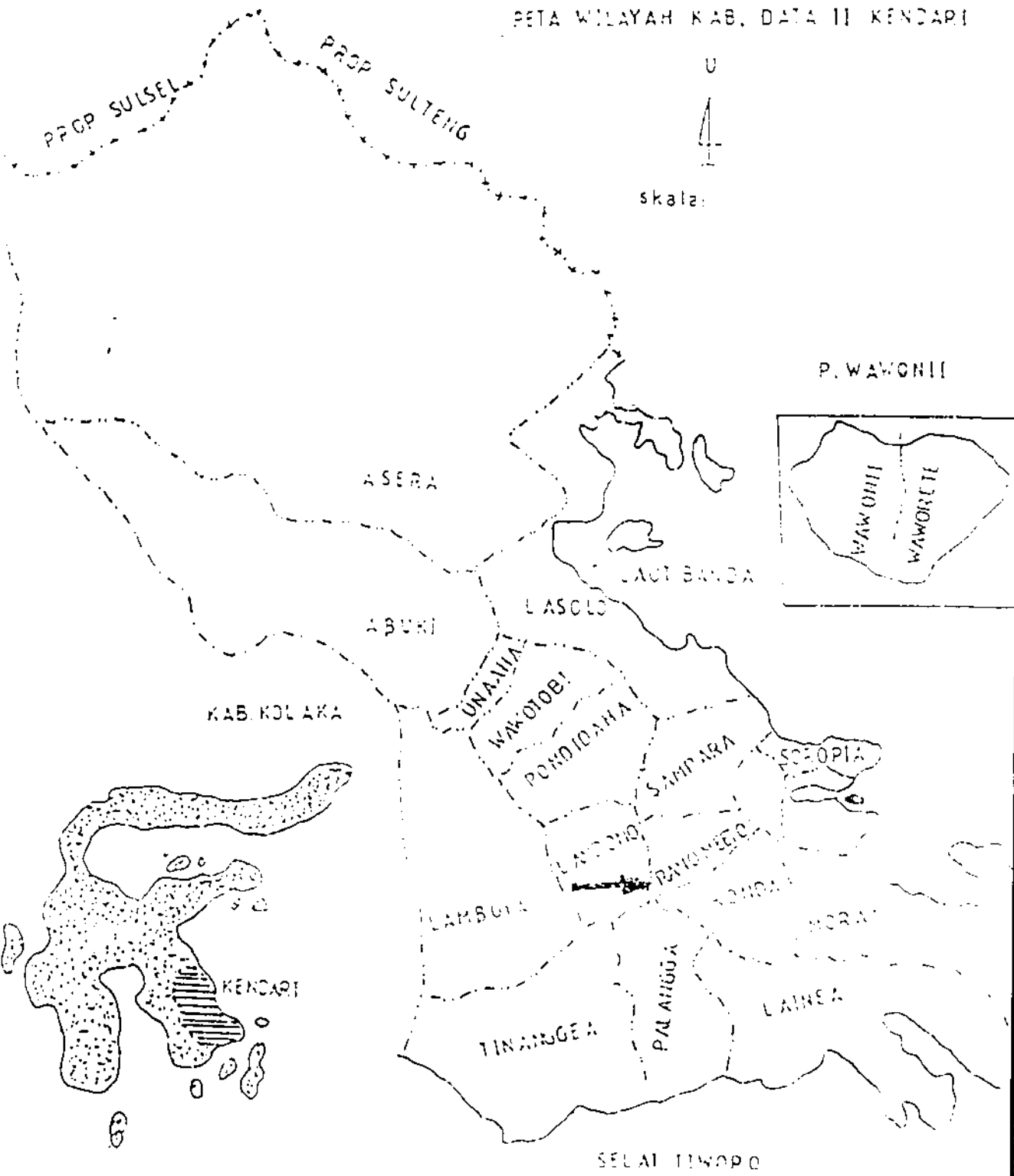
5. Nama : I Ketut Sutarma
 Umur : 56 tahun
 Pendidikan : SLTP
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Agama : Hindu
 Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Jati Bali
 Alamat : Desa Jati Bali

6. Nama : I Gusti Aji Mitro
 Umur : 75 tahun
 Pendidikan : SD
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Agama : Hindu
 Pekerjaan : Tani /Ketua PHDI TK. Desa
 Alamat : Desa Jati Bali
7. Nama : Guru Suteka
 Umur : 60 tahun
 Pendidikan : SD
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Agama : Hindu
 Pekerjaan : Tukang Ukir
 Alamat : Desa Jati Bali
8. Nama : I Made Mudiana
 Umur : 67 tahun
 Pendidikan : SD
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Agama : Hindu
 Pekerjaan : Petani/Pendeta/Mangku Desa
 Alamat : Desa Jati Bali
9. Nama : I Made Dublit
 Umur : 55 tahun
 Pendidikan : SD
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Agama : Hindu
 Pekerjaan : Petani / Ketua LKMD Desa Jati Bali
 Alamat : Desa Jati Bali

PETA : SULAWESI TENGGARA



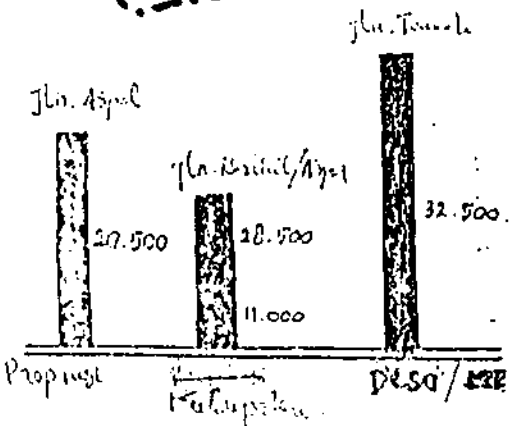
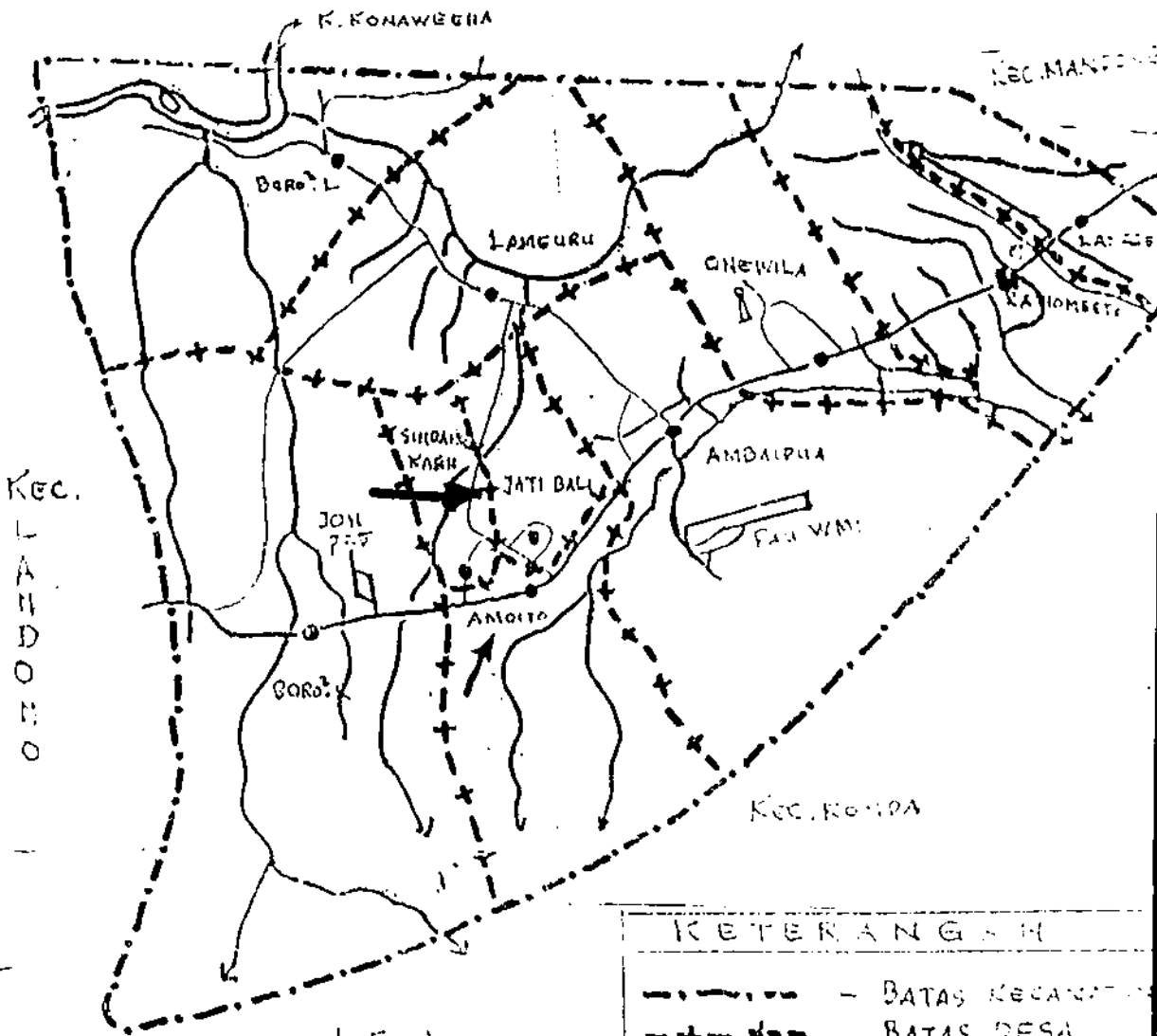
PETA WILAYAH KAB. DATA II KENDARI



➔ : Lokasi Penelitian

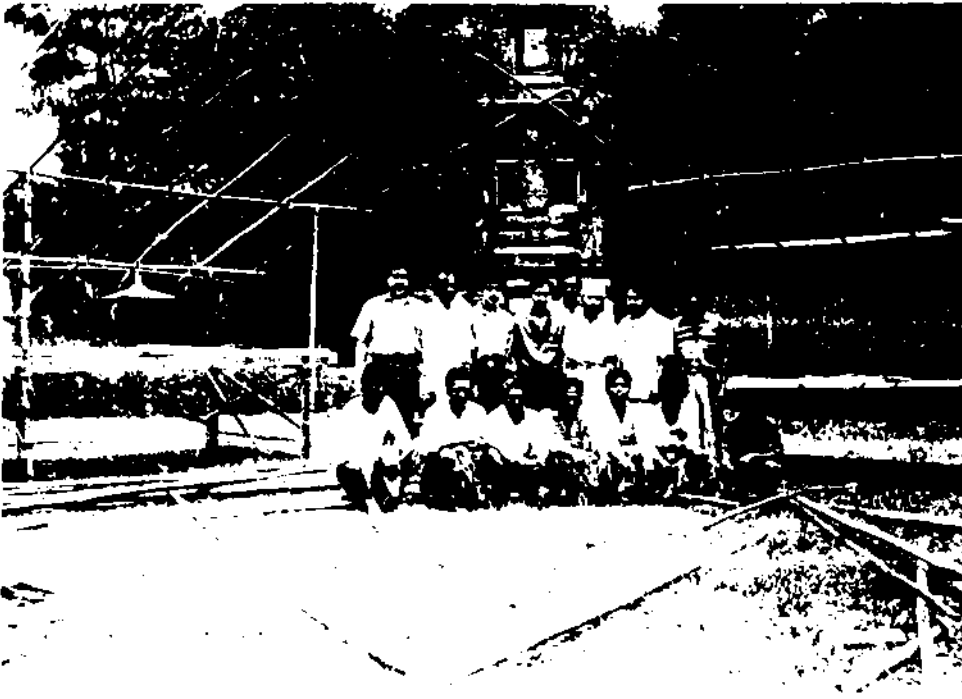
PETA WIL. KEC. RANOMEETO
KABUPATEN KENDARI
SULAWESI TENGGARA

Kec. SAMPARA

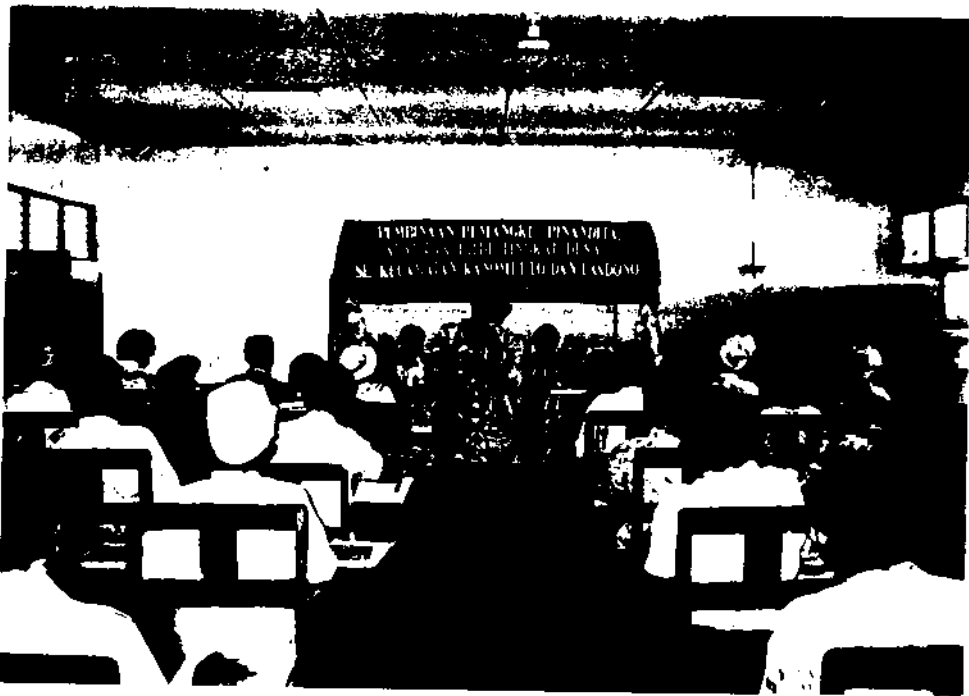


KETERANGAN

	- BATAS KECAMATAN
	- BATAS DESA
	- KALI
	- IBU KOTA KEC
	- DESA
	- RADAR PENSIL
	- JALAN / JEMBATAN
	- NON FISH
	- PAM



Salah satu contoh *Pura Desa* yang ada di desa Jati Bali.



Salah contoh *pembinaan mangkral* dan ketua adat Tk. Kecamatan di Kendari.



Krama banjar dalam mengikuti *paruman*, rapat anggota dalam rangka memperingati hari raya Nyepi.



Karang Taruna Abdi Remaja mengadakan pertemuan atau rapat anggota.



Salah satu contoh fungsi banjar dalam melaksanakan *upacara pitra yadnya* (upacara ngaben)



Salah satu contoh muda-mudi melakukan *kegiatan kerja bakti*



Salah satu contoh fungsi banjar dalam *gotong royong* di daerah transmigrasi desa Jati Bali.



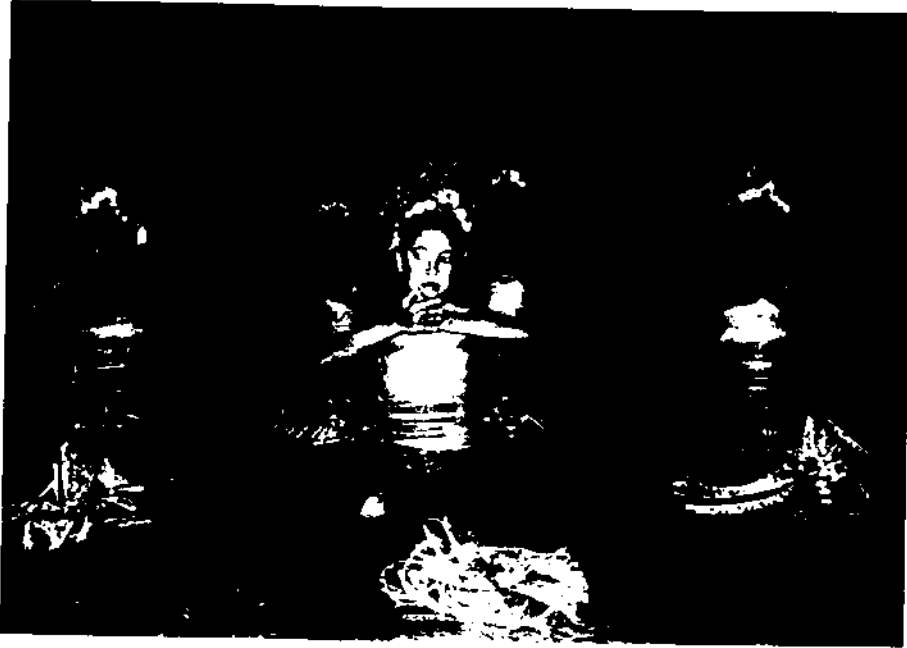
Salah satu contoh anggota krama banjar melakukan *upacara manusia yadnya*.



Ibu-Ibu krama banjar sementara *menjahan banten* atau membentangkan sesajen sarana upacara manusia yadnya.



Salah satu contoh janur atau banten sarana *upacara dewa yadnya*.



Fungsi banjar sebagai sarana *melestarikan seni budaya* melalui tarian Bali.



Pendeta/pemangku sementara memimpin sembahyang bersama anggota krama banjar di Laut (*pada waktu melasti*).

DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

JL. PUTAT INDAH NO. 1 TELP. (031) 577935
SURABAYA - 60189

Surabaya 17 MARET 2000

072/0249/303/2000

Penelitian / Survey
Research

Kepada:

Yth. SDR. GOVERNUR KDH. TK. I SULAWESI
TENGGERA
DI

KENDARI

DR. HADI SUNDEL

Menunjuk Surat No. 100/BIDANG AKADEMIK PROGRAM PASCASARJANA UNIV. AIRLANGGA SURABAYA

Tanggal : 8 MARET 2000

Nomor : 727/JO3.11/PP/2000

Bersama ini diberitahukan bahwa

Nama : DRS. I KETUT SUARDIKA, Spd
Alamat : D/A JL. BHARMAWANGSA DALAM SELATAN SURABAYA
Pekerjaan : MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UNAIR. SURABAYA
Kebangsaan : INDONESIA

Bermaksud mengadakan penelitian / survey / research.

Judul : " KOMUNITAS TRADISIONAL DI DAERAH TRANSMIGRASI (stuatu studi tentang Banjar Adat Bali di Daerah Transmigrasi Desa Jati Kec. Ranomesto Kab. Kendari Prop. Sulawesi Tenggara) "

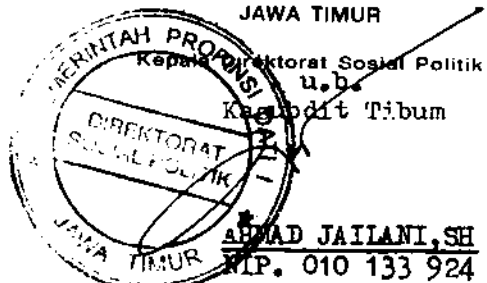
Waktu : 6 (ENAM) BULAN

Lokasi : PROP. SULAWESI TENGGARA

Peneliti wajib mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat

Demikian harap mendapatkan perhatian dan maklum.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR



1. Sdr. Kapolda Jawa Timur
 2. Sdr. Pangdam V Brawijaya
 3. Sdr. Ketua Badan Prop. Jatim
 4. Sdr. Yang bersangkutan
 5. Sdr. Direktur Program Pascasarjana
- KOMUNITAS TRADISIONAL DI DAERAH I KETUT SUARDIKA

DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Jalan Mayjend. Sutoyo No. 2 Telp. (0401) 321370 Fax. (0401) 322112
 KENDARI - 93121

Kendari, 28 Maret 2000.

: 070/602, Dsp.

K e p a d a

ran :

Yth. Bupati Kendari

al : Izin Penelitian.-

Up. Kepala Kantor Sospol
 di -

U n a a h a .-

Dasar surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 072/0249/303/2000 tanggal 17 Maret 2000 perihal izin penelitian.

Setelah mempelajari rencana penelitian/kegiatan yang diajukan yang bersangkutan, dengan ini diharapkan kepada Saudara kiranya memberikan Izin penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi/Pesis/Pendataan kepada :

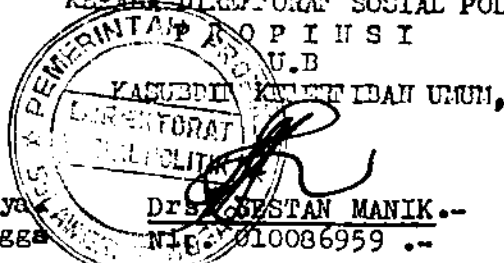
N a m a : Drs. I KETUT SUARDIKA, SFD
Tempat/Tanggal lahir : Tabanan, 15 Maret 1961.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
P e k e r j a a n : Mah. Program Pascasarjana Uni.Airlangga.
A l a m a t : Jl. Tanukila No. 30 Kendari.
J u d u l : KOMUNITAS TRADISIONAL DI DAERAH TRANSMIGRASI (SUATU STUDI TENTANG BANJAR ADAT BALI DI DAERAH TRANSMIGRASI DESA JATI BALI KE - CAMATAN RANOMEETO KAB.KNEDARI PROV.SULTRA.
W a k t u : 6 (enam) Bulan.
L o k a s i : Desa Jati Bali Kec. Ranomeeto.
P e n g i k u t : -

Penanggung jawab : Dir.program pascasarjana Uni.Airlangga.

Kepada yang bersangkutan wajib menghormati adat istiadat di Daerah setempat serta mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan maklum.-

An. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
 KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK



AN :

ernur Sultra sbg.laporan.

elda Sultra di Kendari.

Rem 143 Halulee di Kendari.

Jatim Up.Kadit Sospol di Surabaya

Program Pascasarjana Uni.Airlangga

Surabaya.

Drs.I KETUT SUARDIKA, SFD (KOMUNITAS TRADISIONAL DI DAERAH

I KETUT SUARDIKA

s i p .-

PEMERINTAH KABUPATEN KENDARI

KANTOR SOSIAL POLITIK

Jalan Mayjen S. Parman No. 3 Telp. 21003 Unaaha 93411

Unaaha, 15 April 2000

Nomor : 070 / 489 Ksp
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian / Survey

Kepada
Yth. Kepala K1. Kec. Ranometo
di -
Tempat

Menunjuk Surat

Perihal permintaan izin penelitian, maka dengan ini kami menyampaikan tidak berkeberatan / memberikan izin untuk mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi / tesis / disertasi / pendataan kepada :

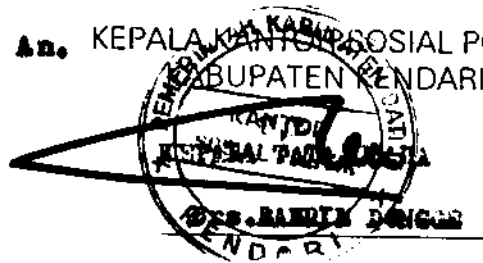
Nama :
Tempat/tgl. lahir : **Bro.I Ketut Suardika,SPD**
Jenis kelamin : **Tabanan, 15 Maret 1961**
Pekerjaan : **Laki - Laki**
Kebangsaan : **Indonesia**
Alamat : **Jl. Pasopis No. 30 Kendari**
Judul : **KOMUNITAS TRADISIONAL DI DAERAH TRANSMIGRASI (SUATU**
Waktu : **STUDI TENTANG MANJAR ADAS BALI DI DAERAH TRANSMIGRASI**
Lokasi : **13-4 s/d 13-9-2000, DESA JATI BALI KEC. RANOMETO KAB. KDI**
Pengikut : **Kec. Ranometo Pym. Jati Bali.**

Penanggung jawab : **Mr. Program Pasopisjama Uni Airlangga**

Kepada yang bersangkutan wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Demikian disampaikan untuk digunakan dan harap bantuan seperlunya.

An. KEPALA KANTOR SOSIAL POLITIK



Sebaran :

- 1. Gubernur Prop. Sultra Up. Kadit Sospol di Kendari;
- 2. Bupati Kab. Kendari (sbg. laporan) di Unaaha;
- 3. Dan Dim 1417 Kendari di Kendari;
- 4. Kapolres Kendari di Kendari;

Yang bersangkutan untuk digunakan

Mr. Program Pasopisjama Uni Airlangga

Arzip.-

I KETUT SUARDIKA

PEMERINTAH KABUPATEN DATI II KENDARI
KECAMATAN ; RANOMEETO
D E S A ; JATI BALI

SURAT KETERANGAN TELAH MENGADAKAN PENELITIAN
Nomor : 470/014/JB/VI/2000

yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Jati Bali menerangkan;

N a m a ; Drs. IKETUT SUARDIKA. SPD.
U m u r ; 38 Tahun
Pekerjaan/Jabatan ; Dosen FKIP, Unhalu Kendari.
A l a m a t ; Jl. Tanukila, No.30, Kelurahan Bende-
wua-wua Kendari.

sehwa Oknum sebagai mana tersebut diatas berdasarkan Izin Penelitian
yang telah diberikan Oleh Kepala Kecamatan Ranomeeto, No.070/362 me -
yang benar telah mengadakan Penelitian di Wilayah Desa Jati Bali yang
mulai pada Bulan Mart dan berakhir Juli 2000.

Demikian Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang ber -
ngkutan agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

